

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kelurahan Kenjeran

4.1.1 Administrasi Kelurahan Kenjeran

Kelurahan Kenjeran terdiri atas 5 RW dan 17 RT. Wilayah RW 5 adalah wilayah Perumahan Pantai Mentari yang dibangun oleh pengembang. Wilayah RW 1 dan 2 adalah kampung dengan tipologi khas sebagai kampung nelayan, sedangkan RW 3 dan 4 adalah masyarakat pendatang yang bermata pencaharian sebagai tukang atau wiraswasta. Jumlah kepala keluarga yang terdapat di RW 1 sampai RW 4 adalah 1018 KK. Batas wilayah dan kondisi geografis di Kelurahan Kenjeran yaitu:

- a. Sebelah utara : Kelurahan Bulak
- b. Sebelah timur : Kelurahan Sukolilo
- c. Sebelah selatan : Kelurahan Komplek Kenjeran
- d. Sebelah barat : Kelurahan Komplek Kenjeran (**Gambar 1.1**)

Kelurahan Kenjeran memiliki potensi ekonomi terkait sumber daya alam, yaitu produk hasil perikanan serta produk daur ulang limbah perikanan. Lokasi permukiman dekat dengan tempat kerja yaitu di laut dan tempat pengolahan ikan. Hal tersebut memudahkan akses dan biaya untuk pencapaian ke tempat kerja. Di sisi lain terdapat permasalahan di lingkungan permukiman tentang aktivitas usaha masyarakat dan pusat pengolahan hasil laut.



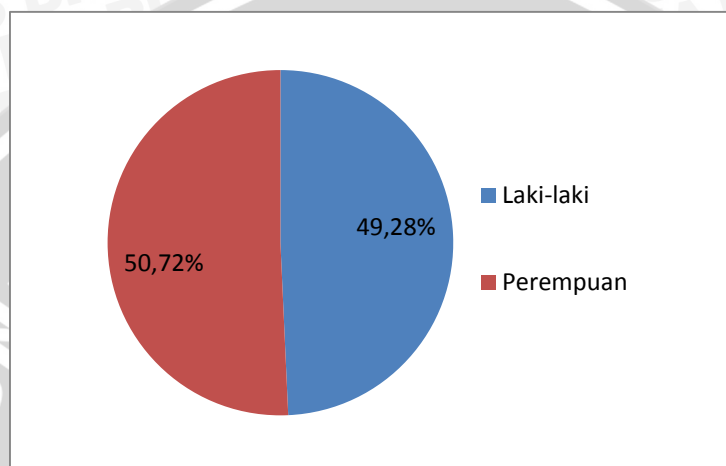
Gambar 4.1 Permasalahan Kelurahan Kenjeran

Gambar 4.1 menunjukkan masyarakat menjemur ikan dan lahan yang dipergunakan adalah jalan lingkungan sehingga mengganggu pemakai jalan dan menimbulkan kesan kumuh. Kebiasaan menjemur ikan di sepanjang tepi jalan mengakibatkan jalan semakin menyempit. Terdapat tempat pelelangan ikan (TPI) yang

kumuh. Kondisi TPI kumuh akibat tumpukan sampah yang berserakan di sekitar kawasan. Berdasarkan hasil wawancara masyarakat di RW 1, tahun 2010 Dinas Pekerjaan Umum sudah memberikan bak sampah, tetapi masyarakat yang beraktivitas di TPI tetap membuang sampah di sembarang tempat.

4.1.2 Kondisi kependudukan Kelurahan Kenjeran

A. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

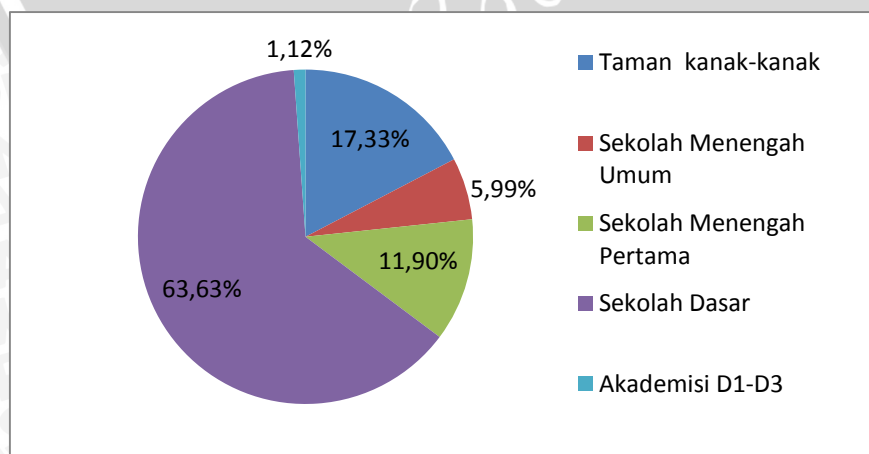


Gambar 4.2 Jumlah penduduk Kelurahan Kenjeran

Sumber: Monografi Kelurahan Kenjeran, 2012

Gambar 4.2 menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kelurahan Kenjeran adalah 50,72% laki-laki dan 49,28% adalah perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam upaya penataan permukiman, laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama secara partisipatif melibatkan masyarakat untuk mendukung program penataan permukiman.

B. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

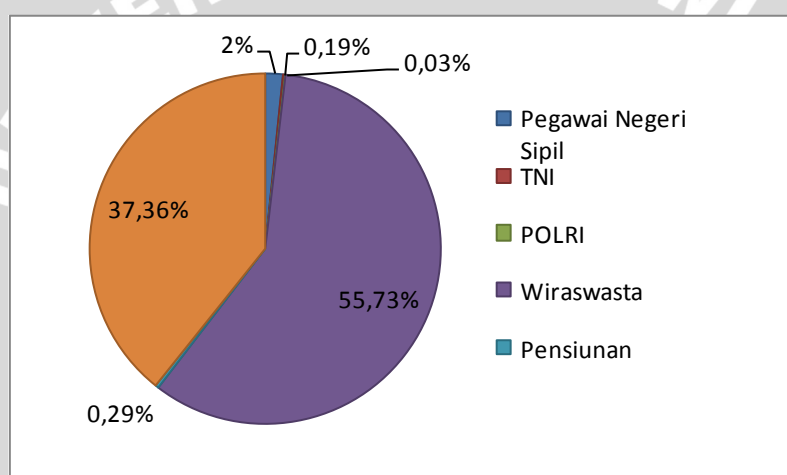


Gambar 4.3 Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

Sumber: Monografi Kelurahan Kenjeran, 2012

Gambar 4.3 menunjukkan presentase penduduk berdasarkan tingkat pendidikan paling tinggi 63,63% yaitu sekolah dasar. Rendahnya tingkat pendidikan berpengaruh dalam upaya penataan permukiman kumuh. Tingkat pendidikan seseorang pada umumnya baik formal maupun informal akan berpengaruh terhadap pandangan, sikap, dan cara berfikir seseorang dalam meningkatkan kualitas permukiman. Semakin tinggi latar belakang pendidikan yang dimiliki seseorang, semakin luas pengetahuan tentang tata cara partisipasi yang diberikan. (Hanafi, Ahmad. 2007). Meskipun perbaikan lingkungan telah diadakan, tidak mempengaruhi kemandirian dan tanggung jawab mereka untuk memperbaiki rumah dan lingkungan.

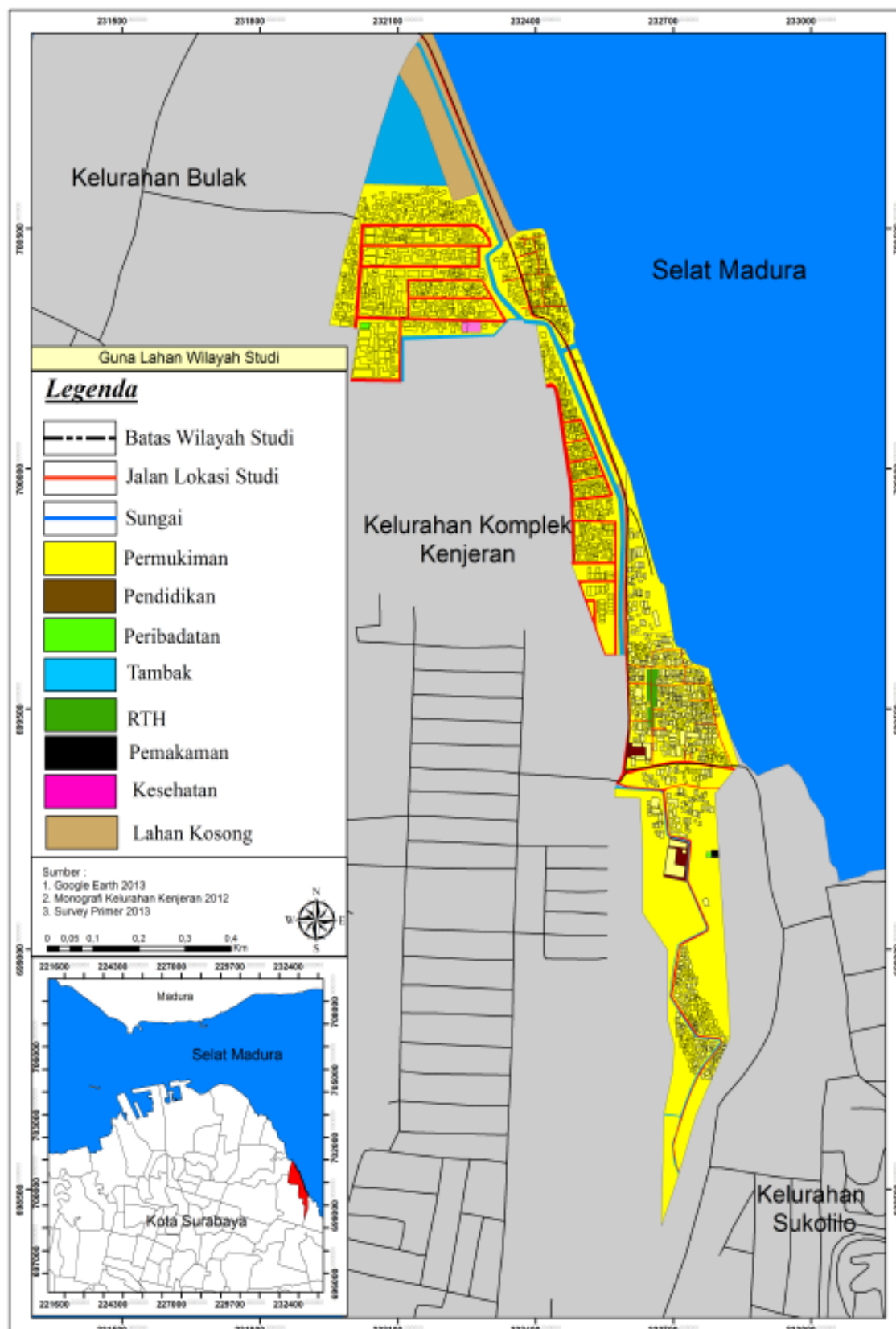
C. Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan



Gambar 4.4 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan
Sumber: Monografi Kelurahan Kenjeran, 2012

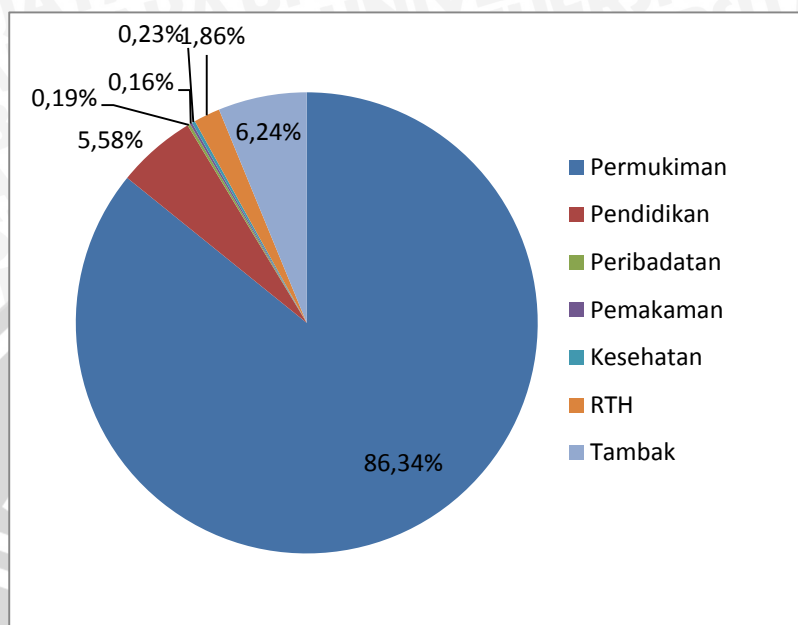
Gambar 4.4 menunjukkan presentase terbesar 55,73% warga di Kelurahan Kenjeran bekerja sebagai wiraswasta (pedagang) dengan pendapatan $\pm$ Rp. 600.000,00/ bulan. Masyarakat yang pekerjaannya sebagai pedagang memiliki kemampuan sumber daya yang rendah dan sibuk dengan kepentingan untuk mencari nafkah. Partisipasi dalam upaya perbaikan lingkungan permukiman juga rendah.

4.1.3 Guna lahan di Kelurahan Kenjeran



Gambar 4.5 Peta guna lahan di Kelurahan Kenjeran

Gambar 4.5 menunjukkan jenis guna lahan yang terdapat di Kelurahan Kenjeran RW 1 sampai RW 4 adalah permukiman, pendidikan, peribadatan, pemakaman, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan tambak.



Gambar 4.6 Presentase guna lahan di Kelurahan Kenjeran

Gambar 4.6 menunjukkan sebagian besar guna lahan Kelurahan Kenjeran adalah permukiman yaitu 86,34%. Berkembangnya guna lahan permukiman berpengaruh terhadap berkurangnya fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memicu pencemaran lingkungan dan banjir. Bencana banjir mengakibatkan kerugian ekonomi masyarakat, rusaknya kondisi jalan, meningkatnya jumlah penduduk yang terserang penyakit menular (diare, demam berdarah, dan Infeksi Saluran Pernafasan Atas), serta berkurangnya waktu produktif masyarakat setempat. Guna lahan terbesar kedua adalah tambak yang terdapat di RW 1 (6,24%), pada kondisi eksisting tambaknya sudah mati. Aktivitas tambak sudah mati karena tercemarnya air yang digunakan untuk tambak dari hasil industri perikanan. Selain itu, lahan tambak terkena rob sehingga merendam lokasi tambak. Kerugian yang diakibatkan adalah para petani tambak kehilangan mata pencaharian serta penurunan pendapatan.

4.2 Gambaran Umum Permukiman di Kelurahan Kenjeran

Kawasan pemukiman di Kelurahan Kenjeran merupakan kawasan yang memiliki permasalahan ruang terkait aktivitas nelayan dan sosial terkait aktivitas pariwisata. Struktur bangunan rumah di Kelurahan Kenjeran adalah permanen, semi permanen, dan

non permanen yang berjumlah 879 unit. Mayoritas bangunan rumah adalah permanen dengan jumlah 616 unit (Monografi kelurahan Kenjeran, 2012)



Gambar 4.7 Kondisi rumah dan sarana prasarana di Kelurahan Kenjeran

Gambar 4.7 menunjukkan bahwa bangunan rumah tidak tertata, begitu pula dengan kondisi bangunan tidak layak. ditandai dinding rumah yang lapuk. Pada warga yang tinggal di RW 2 belum mempunyai sanitasi/MCK individu. Terdapat sanitasi tetapi tidak layak kondisinya sehingga masyarakat melakukan buang air besar di pinggir pantai menyebabkan pencemaran lingkungan.

4.3 Kondisi Prasarana Permukiman di Kelurahan Kenjeran

4.3.1 Drainase



Gambar 4.8 Kondisi drainase di Kelurahan Kenjeran

Gambar 4.8 menunjukkan jenis drainase yang terdapat di Kelurahan Kenjeran di RW 1, RW 2, RW 3, dan RW 4 adalah drainase terbuka. Sejumlah warga di Kelurahan Kenjeran mengeluhkan kurang berfungsinya sistem drainase karena tumpukan sampah, akibatnya timbul pencemaran bau busuk dan menyengat. Pada saat hujan turun, air selokan di tepi jalan langsung meluap dan menimbulkan genangan di badan jalan serta masuk ke pemukiman warga.

4.3.2 Sanitasi

Terdapat bangunan jamban komunal yang sudah dilengkapi dengan instalasi pengelolaan air limbah sederhana di Kelurahan Kenjeran.



Gambar 4.9 Instalasi pengelolaan air limbah Kelurahan Kenjeran

Gambar 4.9 menunjukkan kondisi instalasi pengelolaan air limbah yang terdapat di Kelurahan Kenjeran. Terdapat kegiatan pengolahan limbah industri perikanan yang dilakukan oleh keluarga nelayan. Limbah yang masih baik dimanfaatkan untuk bahan pangan, sedangkan limbah yang kualitasnya menurun dimanfaatkan untuk pakan ternak. Pemanfaatan limbah tersebut kurang dikelola secara maksimal sehingga lingkungan menjadi kotor dan kumuh. Beberapa permasalahan dalam sistem pembuangan air limbah di Kelurahan Kenjeran adalah sebagai berikut :

- Pembuangan air limbah (air kotor) masih banyak dilakukan pada melalui jamban-jamban liar yang didirikan di saluran.
- Terdapat beberapa jamban komunal yang kurang terawat.
- Belum adanya penataan sanitasi terutama infrastruktur pengolahan air limbah untuk wilayah penghasil ikan dan perkampungan nelayan. Air limbah yang dihasilkan mudah menimbulkan bau dan membusuk.

4.3.3 Sistem Persampahan

Sampah di Kelurahan Kenjeran sebagian besar merupakan sampah domestik yang berasal dari rumah tangga. Permasalahan utama sistem pewadahan sampah yaitu:

- Masyarakat tidak memanfaatkan pewadahan sampah komunal yang tersedia.
- Masyarakat memanfaatkan lahan kosong untuk membuang sampahnya sehingga lingkungan terkesan kumuh dan kotor.
- Kondisi tempat pewadahan sampah dengan tipe tetap (batu bata) banyak yang tidak terawat.

Permasalahan tempat pembuangan sampah Kelurahan Kenjeran adalah pengumpulan sampah yang tidak optimal karena keterbatasan tenaga kebersihan

lingkungan dan kebiasaan masyarakat memanfaatkan lahan kosong untuk pembuangan sampah. Terkait dengan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Kenjeran, pengelolaan sampah berbasis masyarakat masih kurang dilakukan.

4.3.4 Ruang terbuka hijau (RTH)

Pada kawasan permukiman Kelurahan Kenjeran, RTH tersedia pada wilayah RW 3. Luas RTH adalah 0,21 Hektar atau 1,86% dari keseluruhan luas wilayah Kelurahan Kenjeran. Kondisinya tidak terawat akibat hewan ternak yang dimiliki oleh warga RW 3. RW 1, RW 2 dan RW 4 tidak memiliki RTH. Berdasarkan pendapat warga RW 4 Kelurahan Kenjeran, menurunnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik berupa ruang terbuka hijau telah mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan seperti seringnya terjadi banjir, tingginya polusi udara, dan meningkatnya kerawanan sosial (kriminalitas dan krisis sosial).

4.4 Bencana Alam di Kelurahan Kenjeran

4.4.1 Bencana puting beliung

Berdasarkan wawancara ketua RW 2, angin puting beliung biasanya diawali hujan deras dan angin kencang. Angin puting beliung di Kelurahan Kenjeran terjadi selama peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau. Tidak pernah terdapat korban jiwa akibat bencana tersebut. Belum terdapat sistem peringatan dini puting beliung di Kelurahan Kenjeran sampai saat ini karena bersifat mendadak, hanya terjadi pada waktu kurang dari 15 menit. Dampak lain yang ditimbulkan adalah bangunan semi permanen, non permanen, dan perahu milik nelayan mengalami kerusakan ringan.

4.4.2 Pasang surut air laut

Berdasarkan hasil wawancara ketua RW 2, gelombang pasang tertinggi di Kelurahan Kenjeran ± 2 meter. Jika terjadi pasang air laut, maka aktivitas nelayan terhenti dan tidak berani melaut. Keadaan tersebut mempengaruhi pendapatan nelayan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Pendapatan mereka tidak menentu di setiap bulannya. Apabila tidak melaut, mereka tidak mendapatkan penghasilan apa pun.

4.4.3 Abrasi pantai

Berdasarkan hasil wawancara ketua RW 1, abrasi merupakan bencana yang dianggap biasa. Mereka tetap tinggal di bibir pantai karena alasan ekonomi. Dalam mengatasi abrasi masyarakat membuat tanggul dari karung yang diisi pasir dengan tancapan bambu yang diletakkan di dekat rumah. Hutan mangrove yang dijadikan penahan ombak banyak yang tumbang karena populasinya berkurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa perhatian pemerintah dalam upaya pengendalian abrasi masih rendah. Diharapkan pemerintah setempat segera membangun tanggul untuk antisipasi ancaman abrasi menyerang permukiman penduduk.

4.4.4 Bencana banjir

Banjir di Kelurahan Kenjeran melanda wilayah RW 1, RW 2, RW 3, dan RW 4. Banjir merendam wilayah RW 1 sampai RW 4 selama satu sampai dua hari. Ketinggian banjir mencapai ± 50 cm. Banjir tersebut juga merendam tambak milik petani yang terletak di RW 1. Aktivitas warga terganggu dan kehilangan mata pencaharian karena menggantungkan kebutuhan hidupnya dari bertani tambak. Banjir tersebut diakibatkan karena sampah yang menggenang di saluran air hujan dan kebiasaan masyarakat yang membuang sampah di pinggir pantai.

4.4.5 Bencana kebakaran

Kebakaran di Kelurahan Kenjeran terjadi pada RW 1, RW 3, dan RW 4. Kebakaran yang terjadi pada setiap RW tersebut disebabkan tabung gas pada rumah warga bocor dan dipakai tempat usaha. Berdasarkan hasil wawancara pada setiap RW, masyarakat pengguna kompor gas belum mengerti cara pemasangan dan penggunaan kompor gas yang aman. Tidak terdapat korban jiwa akibat kebakaran tersebut. Kerugiannya adalah sebagian rumah serta warung yang digunakan untuk tempat usaha terbakar.

4.5 Kelembagaan di Kelurahan Kenjeran

Sebagian masyarakat di permukiman Kelurahan Kenjeran berpartisipasi secara aktif di dalam kegiatan organisasi. Masyarakat terlibat dengan mengikuti dua atau lebih organisasi kemasyarakatan. Tetapi potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena belum adanya pembinaan dalam berorganisasi, keterbatasan pengetahuan, dan terhambatnya akses kontrol dalam pengambilan keputusan.

4.5.1 Kelembagaan formal

A. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

BKM di Kelurahan Kenjeran berdiri pada tahun 2007. BKM mewadahi KSM yang anggotanya adalah masyarakat di Kelurahan Kenjeran. Kelemahan yang terjadi sampai saat ini adalah terkikisnya kesadaran masyarakat dalam upaya perbaikan lingkungan. Maka dari itu, BKM berupaya mengembalikan pola pikir masyarakat yang 90% sumber daya manusianya adalah menengah ke bawah. BKM dibentuk secara swadaya oleh masyarakat. Perbaikan lingkungan permukiman dalam BKM Kelurahan Kenjeran disesuaikan dengan peran kelompok masyarakat yaitu melaksanakan kerja bakti dan perbaikan jalan lingkungan. Sosialisasi terkait perbaikan infrastruktur permukiman dilakukan satu bulan sekali dengan tokoh masyarakat serta ketua RT/RW. BKM memberikan bantuan ekonomi masyarakat, yaitu menjalin kerja sama dengan Bank Jatim. Upaya peningkatan ekonomi yang dilakukan oleh kelompok BKM yaitu memberikan pinjaman dana bergulir.

B. Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK)

Program LKMK Kenjeran adalah:

1. Perbaikan sarana prasarana permukiman. Dilakukan kelompok masyarakat pada kegiatan pembangunan dengan kerja bakti.
2. Peningkatan kualitas pengurus RW dan RT (pelatihan sosialisasi peningkatan peran ketua RW dan RT dalam pelaksanaan program).
3. Pelatihan ketrampilan bagi masyarakat misalnya ketrampilan kewirausahaan dan ketrampilan dengan tujuan menambah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Pelatihan manajemen koperasi bagi masyarakat. Pada Kelurahan Kenjeran, operasionalisasi koperasi serba usaha tidak berkembang disebabkan karena pada awal program berjalan, koperasi serba usaha lebih banyak terlibat dalam hal pembangunan fisik lingkungan.
5. Peningkatan kualitas hidup sehat masyarakat dengan penyuluhan mengenai MCK sehat dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat.

4.5.2 Kelembagaan non formal

A. Karang taruna

Kelompok karang taruna di Kelurahan Kenjeran terdapat pada setiap RW. Pembinaan karang taruna diutamakan pada peningkatan kemampuan dan kemandirian karang taruna sebagai wadah pengembangan potensi dan peran serta masyarakat usia produktif. Program untuk mengatasi masalah permukiman adalah penyuluhan mengenai kesehatan lingkungan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat menjaga kesehatan lingkungan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan pihak puskesmas Kelurahan Kenjeran.

B. Pengajian

Kegiatan pengajian warga Kelurahan Kenjeran, dilaksanakan rutin pada setiap bulan di masjid dan di rumah anggota. Terdapat satu kelompok pengajian pada setiap RW. Di samping mempelajari tentang kegiatan agama, kelompok pengajian melakukan kegiatan sosial yaitu kegiatan gotong royong dalam upaya perbaikan lingkungan dengan kerja bakti.

C. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Keterlibatan PKK di Kelurahan Kenjeran adalah sebagai kader Posyandu. Selain itu, kader PKK ikut terlibat dalam penyuksesan program Bina Keluarga Balita. Setiap satu bulan sekali, kader PKK mengadakan penyuluhan bagi ibu dan balita mengenai pengetahuan tentang gizi balita. Tujuan utama untuk peningkatan kesejahteraan keluarga sehingga dapat mengambil peran penting bersama dengan lembaga yang ada, tidak hanya berorientasi pada masalah perempuan. Program untuk penataan permukiman adalah kegiatan pembinaan masyarakat sadar lingkungan.

4.6 Program Peningkatan Kualitas Permukiman di Kelurahan Kenjeran

Masyarakat RW 1-RW 4 Kelurahan Kenjeran menerima bantuan program perbaikan permukiman tahun 2003 yaitu KIP-K, KIP, dan JPS. Program bantuan tersebut tidak berhasil. Masyarakat memiliki ketergantungan terhadap pemerintah setempat. Hal tersebut justru menjadikan masyarakat tidak dapat mandiri. Masyarakat kurang memahami tentang penyebab lingkungan kumuh, sehingga program-program perbaikan tidak didasarkan isu-isu terkait yang terjadi. Program yang berhasil diterima di Kelurahan Kenjeran adalah PNPM-MP dalam hal pembangunan fisik pada tahun 2012.

Tabel 4.1 Program Perbaikan Permukiman Kelurahan Kenjeran

KIP	KIP-K	JPS	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP)
Program KIP diterima oleh warga Kelurahan Kenjeran wilayah RW 1-RW 4 pada tahun 2003. Dilaksanakan perbaikan fasilitas lingkungan seperti perbaikan drainase, jalan lingkungan serta sanitasi menyangkut kebersihan terhadap sarana mandi cuci kakus warga, tetapi pelaksanaannya terlambat dan tidak berkelanjutan (Kusumastuti, 2008). Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak BKM Kelurahan Kenjeran, penyebab ketidakberlanjutan tersebut adalah pembangunan infrastruktur permukiman tidak melibatkan masyarakat dalam hal perumusan tujuan, perencanaan, pelaksanaan, sampai pada pemeliharannya. Masyarakat perlu dilibatkan penuh dalam program KIP. Partisipasi masyarakat belum maksimal karena pada tahapan perencanaan program dan pelaksanaannya, realisasinya belum sesuai dengan target yang seharusnya melibatkan masyarakat secara penuh. Selain itu, tidak dilakukan survei sosial sebelumnya mengenai kondisi penduduk di Kelurahan Kenjeran, misalnya aspek sumber daya manusia, kondisi sosial ekonomi serta kondisi fisik rumah dan lingkungan	Program KIP-K diterima oleh warga Kelurahan Kenjeran wilayah RW 1-RW 4. pada tahun 2003, tetapi pelaksanaannya terlambat dan tidak berkelanjutan (Kusumastuti, 2008). Program KIP-K meliputi program pengembangan masyarakat, program perbaikan fisik lingkungan, dan program perbaikan rumah. Berdasarkan informasi dari BKM Kelurahan Kenjeran, kegiatan yang direncanakan didalam program pengembangan masyarakat adalah pemberian kredit usaha kecil kepada masyarakat, mengadakan kursus ketrampilan, pelatihan kesehatan lingkungan dan pelatihan usaha kecil. Dalam pelaksanaannya ternyata tidak semua rencana kegiatan dapat terlaksana. Kegiatan pelatihan kursus keterampilan tidak dapat dijalankan secara berkala. Penduduk kebanyakan tidak memiliki pemahaman dan ketrampilan. Masyarakat yang mendapat bantuan program KIP-K kurang mandiri. Kemandirian yang masih kurang adalah terhadap pengadaan modal usaha. Hal ini disebabkan pendapatan dari usaha hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga kemampuan untuk menabung relatif kecil.	Program JPS merupakan bantuan pendapatan yang didapat melalui keikutsertaan pada program pekerjaan umum. Diantaranya transfer dana untuk keluarga miskin. Program tersebut didapatkan oleh warga di Kelurahan Kenjeran wilayah RW 1-RW 4 pada tahun 2003, tetapi pelaksanaannya terlambat dan tidak berkelanjutan (Kusumastuti, 2008). Berdasarkan informasi dari BKM Kelurahan Kenjeran, program JPS tersebut diarahkan untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) berbasis masyarakat untuk meningkatkan taraf ekonomi. Kegiatan program meliputi pelatihan dan pendampingan. Kegiatan pelatihan tersebut dikaitkan dengan upaya pengendalian permukiman kumuh, sehingga diharapkan pengetahuan yang diperoleh masyarakat dapat dimanfaatkan untuk perbaikan permukiman kumuh. Penyebab ketidakberlanjutan karena kesulitan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan informasi jumlah pendapata pendapatan dan umur.	PNPM-MP merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat sebagai upaya mengentaskan kemiskinan di perkotaan. PNPM-MP diterima oleh warga Kelurahan Kenjeran pada tahun 2012, difokuskan untuk pembangunan fisik. Proyek pembangunan fisik telah berhasil dengan bantuan swadaya masyarakat serta Pemerintah Kota Surabaya. Menurut hasil wawancara warga di RW 2, jalan-jalan kendaraan dan jalan setapak sudah ada yang diberi perkerasan dengan paving sehingga di musim hujan tidak becek. Saluran-saluran drainase telah diperbaiki dan diberi pasangan tembok, sehingga dapat mengurangi genangan diwaktu hujan. Kelompok sasaran dari program tersebut adalah kelompok swadaya masyarakat. Hasil kegiatan dikelola dan dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat/ pemanfaat melalui kelompok pengelola yang dipilih.

4.7 Analisis Tingkat Kekumuhan

4.7.1 Lokasi

A. Legalitas tanah

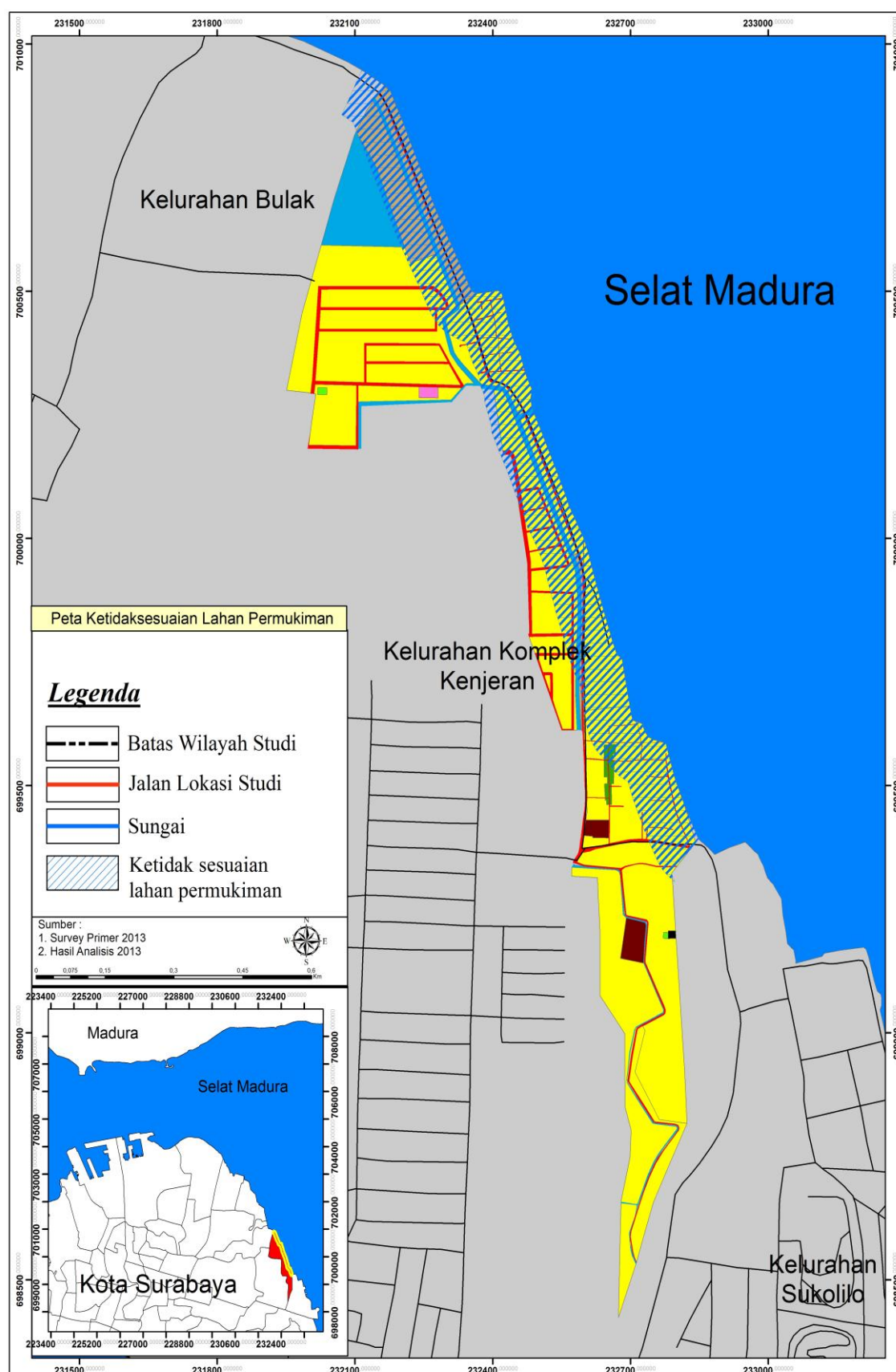
Kondisi legalitas tanah pada RW 1 sampai RW 4 telah memiliki kesesuaian sebagai lahan untuk permukiman berdasarkan RDTRK Kecamatan Bulak. Tetapi berdasarkan hasil analisis, terdapat permukiman yang tidak menempati lahan untuk permukiman yaitu pada wilayah RW 1, RW 2, dan RW 3. Permukiman wilayah tersebut melanggar garis sempadan pantai. Berdasarkan Pedoman Pemanfaatan Ruang Tepi Pantai, lebar sempadan pantai adalah 100 meter. Bentuk Pantai Kenjeran landai dan tinggi gelombang >2m dengan kondisi fisik labil tanpa pengendapan. (Laporan Topografi Pantai Kenjeran Surabaya, 2010)

Tabel 4.2 Legalitas Tanah

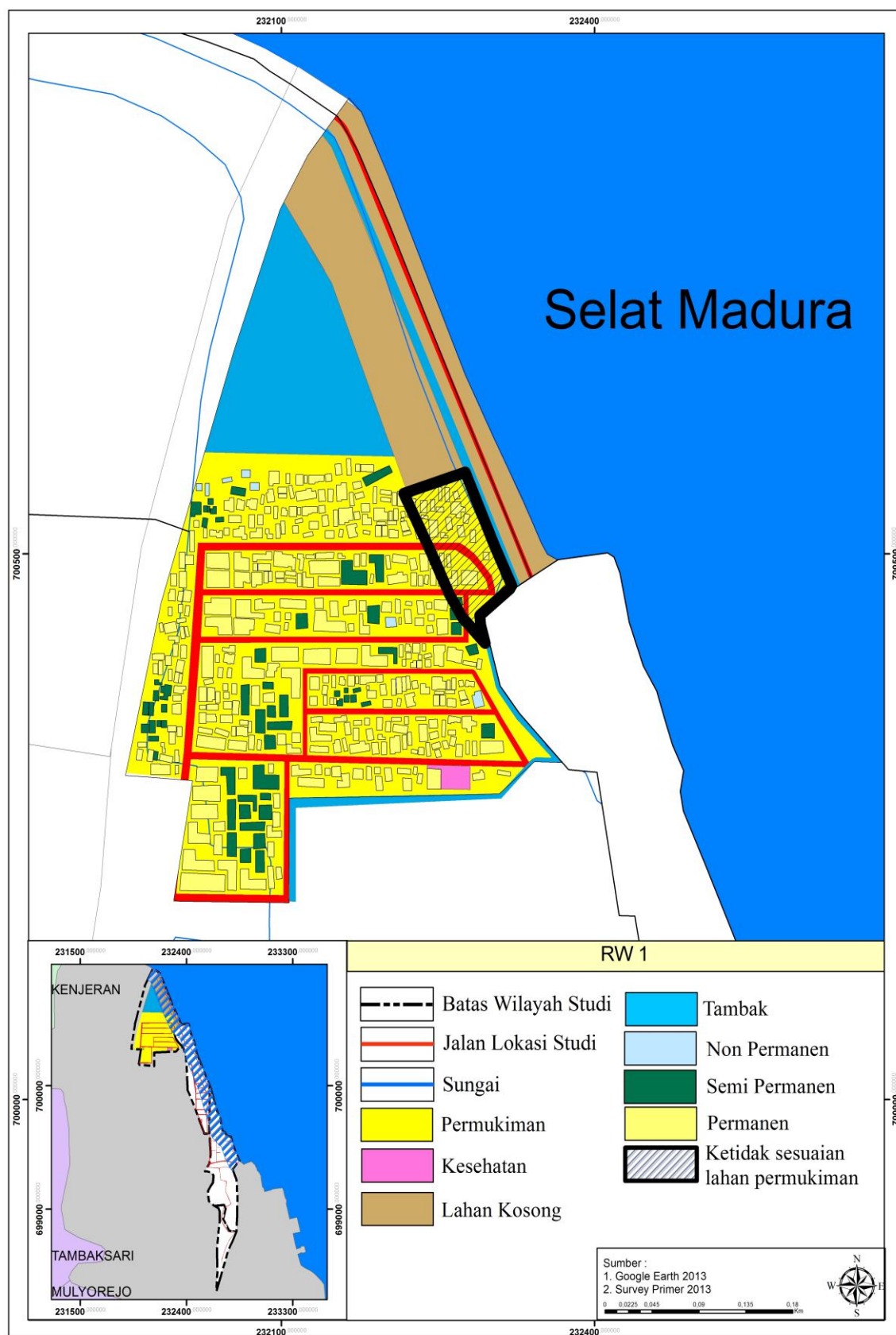
No	Wilayah	Luas permukiman (Ha)	Luas bangunan rumah yang tidak sesuai peruntukan permukiman (Ha)	Presentase luas bangunan rumah non permukiman (%)	Tingkat kekumuhan
1	RW 1	12	0,9	7,5	Tidak kumuh
2	RW 2	9,33	6	64,30	Kumuh berat
3	RW 3	11,25	5,5	48,88	Kumuh sedang
4	RW 4	4,51	-	0	Tidak kumuh

Sumber: Hasil observasi Kelurahan Kenjeran dan Pengukuran Arcgis, 2013.

Tabel 4.2 menunjukkan wilayah di RW 2 memiliki luas bangunan rumah non permukiman paling tinggi yaitu 64,30% dan merupakan kondisi kumuh berat karena besarnya luas lahan yang bukan peruntukan permukiman antara 51-70% (**Tabel 3.7**). Wilayah RW 1 dan RW 4 termasuk tidak kumuh karena luas bangunan rumah non permukiman kurang dari 10%. (**Tabel 3.7**). Kondisi ketidaksesuaian lahan permukiman di Kelurahan Kenjeran terdapat pada **Gambar 4.10**

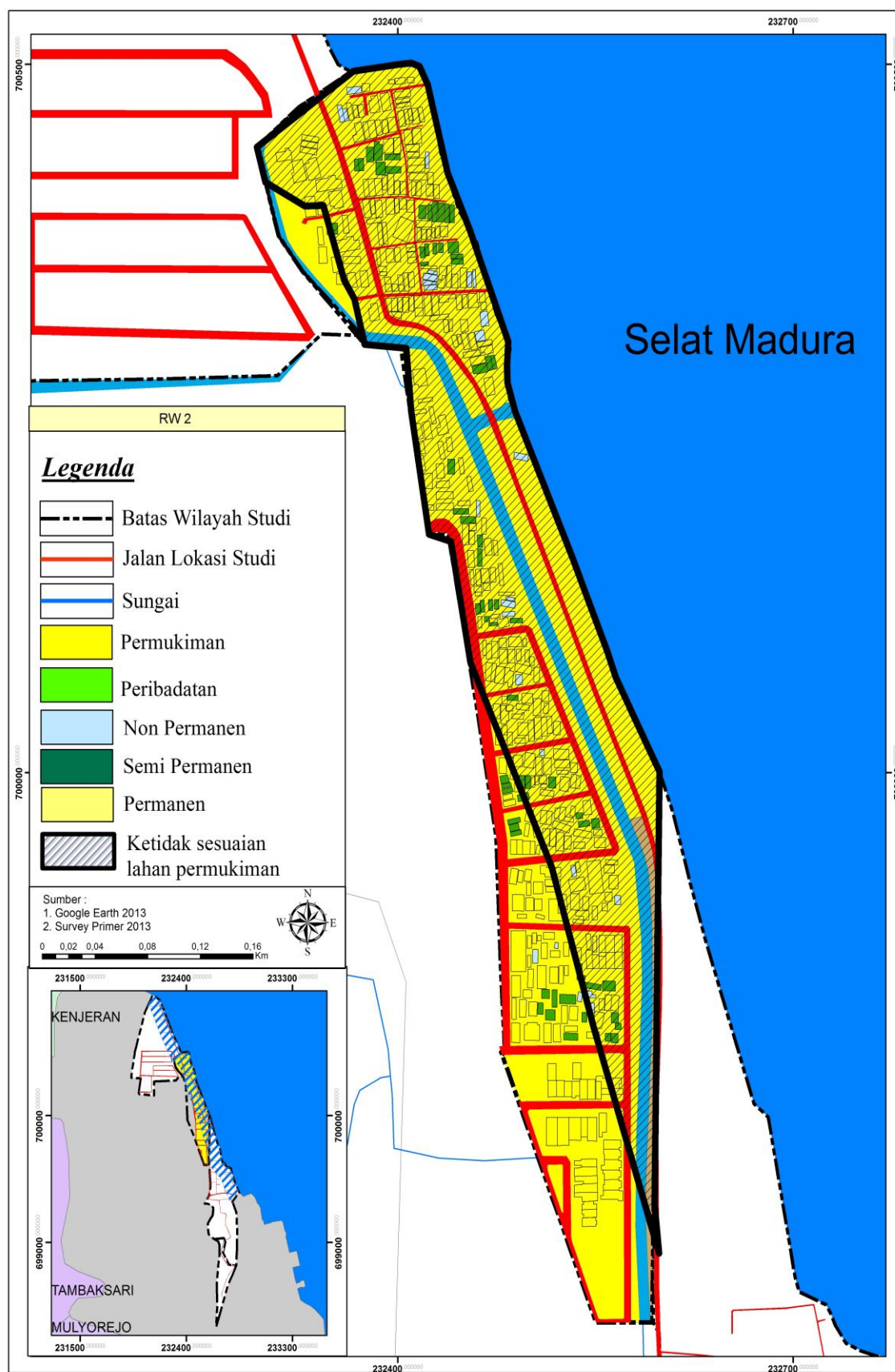


Gambar 4.10 Peta ketidaksesuaian lahan permukiman Kelurahan Kenjeran



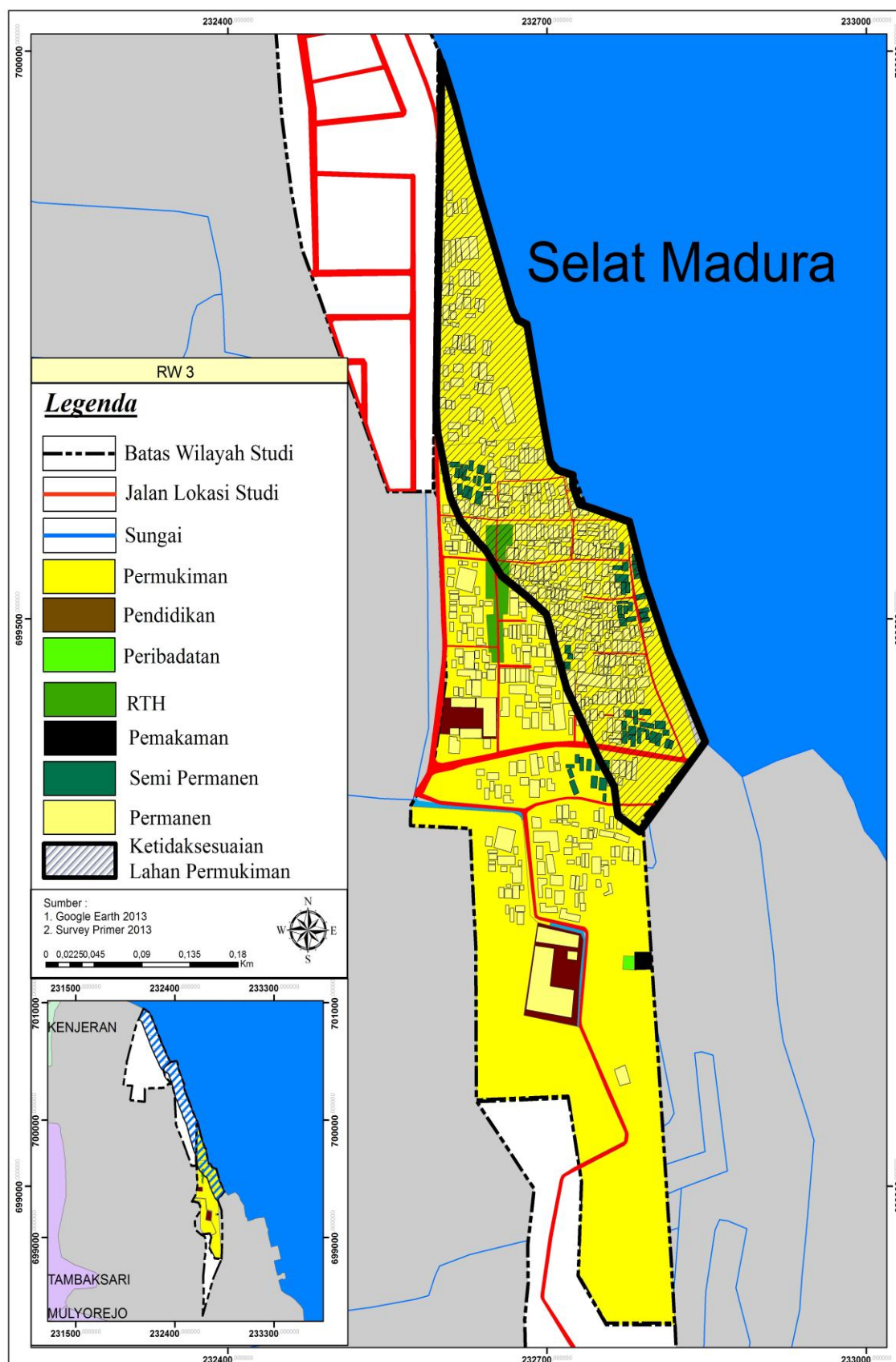
Gambar 4.11 Peta wilayah permukiman RW 1

Gambar 4.11 menunjukkan luas bangunan rumah yang tidak sesuai untuk permukiman di wilayah RW 1. Luas wilayah permukiman di RW 1 adalah 12 Hektar. Terdapat bangunan permukiman yang tidak sesuai peruntukan permukiman dengan jumlah 22 unit yang luasnya 0,9 Hektar (7,5%) dari wilayah RW 1. Ketidaksesuaian lahan permukiman tersebut karena melanggar garis sempadan pantai sejauh 100 meter. Belum diterapkannya sempadan 100 meter sehingga bangunan di sepanjang pantai memenuhi lahan pantai. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang tinggi pada bangunan sepanjang pantai menyebabkan hilangnya fungsi ruang terbuka. Besarnya KDB adalah 80-90%. Dari hal tersebut diketahui, pembangunan fisik permukiman tidak terkendali berkaitan langsung dengan berkurangnya area hijau. Dampak yang ditimbulkan dari ketidaksesuaian lahan permukiman yaitu, timbul pencemaran lingkungan dan menimbulkan genangan air. Wilayah tersebut rentan terhadap bencana abrasi. Perubahan garis pantai terhadap abrasi berpengaruh terhadap kondisi lingkungan fisik permukiman. Hutan bakau yang seharusnya dimanfaatkan sebagai penahan abrasi, ditebang sebagian oleh sebagian masyarakat RW 1 karena mereka melakukan pembangunan rumah/bangunan non permanen. Apabila kegiatan tersebut dilakukan terus menerus, dikhawatirkan hilangnya ekosistem hutan bakau sepanjang pesisir yang menyebabkan abrasi dan pantai akan musnah. Selain disebabkan bencana alam, permasalahan lingkungan permukiman di RW 1 disebabkan oleh aktivitas masyarakat yang dilandasi kurangnya kesadaran masyarakat serta pemahaman tentang fungsi lingkungan. Kebiasaan masyarakat langsung membuang sampah ke pantai masih ada sampai sekarang. Masyarakat membuang sampah ke pantai karena jarak tempat pembuangan sampah (TPS) jauh dari permukiman masyarakat yaitu 500 meter. Masyarakat tidak menginginkan adanya jasa pelayanan sampah, karena alasan ekonomi. Selain aspek fisik, berdampak pula terhadap kondisi sosial ekonomi yaitu pendapatan masyarakat. Mayoritas penduduk RW 1 yang tinggal di sempadan pantai adalah golongan ekonomi menengah ke bawah dengan latar belakang pendidikan yang terbatas. Pengetahuan mereka tentang kesehatan lingkungan yang sehat dan teratur masih rendah. Maka, timbul kebiasaan masyarakat yang tidak sadar terhadap lingkungan dan tidak memperhatikan bahaya dan resiko di masa sekarang dan masa yang akan datang.



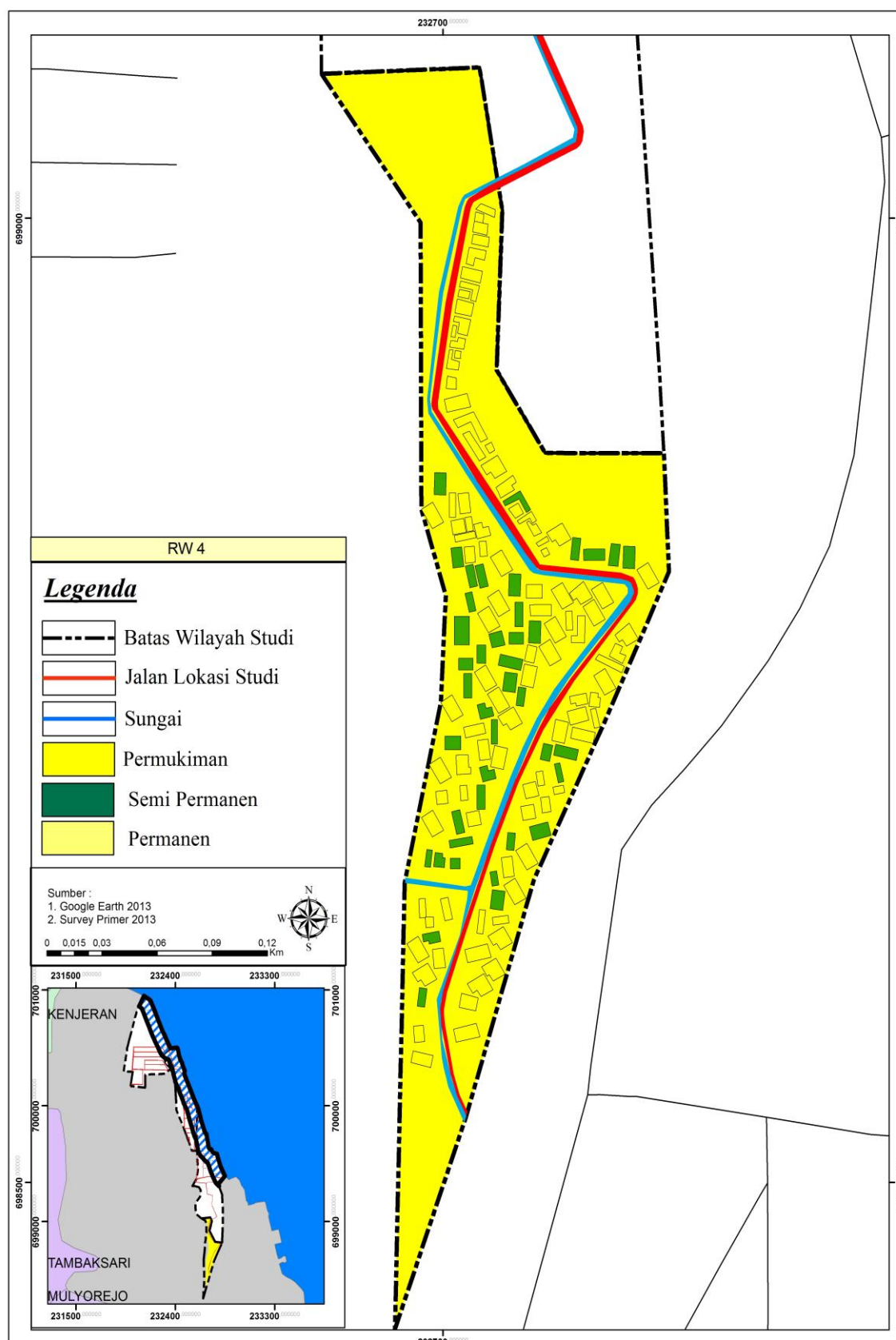
Gambar 4.12 Peta wilayah permukiman RW 2

Gambar 4.12 menunjukkan luas bangunan rumah yang tidak sesuai untuk permukiman di wilayah RW 2. Luas wilayah permukiman di RW 2 adalah 9,33 Hektar. Terdapat bangunan rumah yang tidak sesuai peruntukan permukiman dengan jumlah 86 unit yang luasnya 9 Hektar (64,30%) dari wilayah RW 2. Ketidaksesuaian lahan permukiman tersebut karena melanggar garis sempadan pantai sejauh 100 meter. Belum diterapkannya sempadan 100 meter sehingga bangunan di sepanjang pantai memenuhi lahan pantai. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang tinggi pada bangunan sepanjang pantai menyebabkan hilangnya fungsi ruang terbuka. Besarnya KDB adalah 80-90%. Dari hal tersebut diketahui, pembangunan fisik permukiman tidak terkendali berkaitan langsung dengan berkurangnya area hijau. Wilayah RW 2 memiliki presentase ketidaksesuaian lahan permukiman yang paling besar dibandingkan wilayah RW lain. Hal tersebut mengindikasikan bahwa wilayah RW 2 paling rentan terhadap bencana abrasi. Gelombang yang datang masuk ke permukiman warga. Gelombang yang datang terus menerus mengakibatkan erosi pantai secara berkelanjutan, sehingga permukiman penduduk mengalami gangguan gelombang. Gelombang besar tersebut dapat merendam permukiman warga dan mengurangi lahan kawasan pantai. Hutan bakau yang seharusnya dimanfaatkan sebagai penahan abrasi, ditebang sebagian oleh sebagian masyarakat RW 2 karena mereka melakukan pembangunan rumah/bangunan non permanen. Apabila kegiatan tersebut dilakukan terus menerus, dikhawatirkan hilangnya ekosistem hutan bakau sepanjang pesisir menyebabkan abrasi dan pantai akan musnah. Selain disebabkan bencana alam, permasalahan lingkungan permukiman di RW 2, disebabkan oleh aktivitas masyarakat yang dilandasi kurangnya kesadaran masyarakat serta pemahaman tentang fungsi lingkungan. Kebiasaan masyarakat langsung membuang sampah ke pantai masih ada sampai sekarang. Masyarakat membuang sampah ke pantai karena jarak tempat pembuangan sampah (TPS) jauh dari permukiman masyarakat. Masyarakat tidak menginginkan adanya jasa pelayanan sampah karena alasan ekonomi. Mayoritas penduduk RW 2 yang tinggal di sempadan pantai adalah golongan ekonomi menengah ke bawah dengan latar belakang pendidikan yang terbatas. Maka, timbul kebiasaan masyarakat yang tidak sadar terhadap lingkungan dan tidak memperhatikan bahaya dan resiko di masa sekarang dan masa yang akan datang.



Gambar 4.13 Peta wilayah permukiman RW 3

Gambar 4.13 menunjukkan luas bangunan rumah yang tidak sesuai untuk permukiman di wilayah RW 3. Luas wilayah permukiman di RW 3 adalah 11,25 Hektar. Terdapat bangunan rumah yang tidak sesuai peruntukan permukiman yang jumlahnya 90 persil dengan luas 4,5 Hektar (40%) dari wilayah RW 3. Ketidaksesuaian lahan permukiman tersebut karena melanggar garis sempadan pantai sejauh 100 meter. Belum diterapkannya sempadan 100 meter sehingga bangunan di sepanjang pantai memenuhi lahan pantai. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang tinggi pada bangunan sepanjang pantai menyebabkan hilangnya fungsi ruang terbuka. Besanya KDB adalah 80-90%. Dari hal tersebut diketahui, pembangunan fisik permukiman tidak terkendali berkaitan langsung dengan berkurangnya area hijau. Dampak yang ditimbulkan dari ketidaksesuaian lahan permukiman yaitu, timbul pencemaran lingkungan dan menimbulkan genangan air. Wilayah tersebut rentan terhadap bencana abrasi. Perubahan garis pantai terhadap abrasi berpengaruh terhadap kondisi lingkungan fisik permukiman. Hutan bakau yang seharusnya dimanfaatkan sebagai penahan abrasi, ditebang sebagian oleh sebagian masyarakat RW 3. Apabila kegiatan tersebut dilakukan terus menerus, dikhawatirkan hilangnya ekosistem hutan bakau sepanjang pesisir yang menyebabkan abrasi dan pantai akan musnah. Ekosistem yang berada pada sekitar Pantai Kenjeran mengalami kerusakan akibat aktivitas permukiman. Pada wilayah RW 3, terjadi pencemaran air karena sisa aktivitas industri perikanan serta kebiasaan masyarakat RW 1 dan RW 2 yang langsung membuang sampah ke pantai. Mayoritas penduduk RW 3 yang tinggal di sempadan pantai adalah golongan ekonomi menengah ke bawah dengan latar belakang pendidikan yang terbatas. Pengetahuan mereka tentang kesehatan lingkungan yang sehat dan teratur masih rendah. Maka, timbul kebiasaan masyarakat yang tidak sadar terhadap lingkungan dan tidak memperhatikan bahaya dan resiko di masa sekarang dan masa yang akan datang.



Gambar 4.14 Peta wilayah permukiman RW 4

Gambar 4.14 menunjukkan permukiman di wilayah RW 4. Pemukiman di RW 4 mayoritas bangunannya adalah permanen. Luas wilayah permukiman di RW 4 adalah 4,51 Hektar. Tidak terdapat lahan permukiman yang melanggar garis sempadan pantai. Seluruh lahan permukiman di wilayah RW 4 sesuai dengan peruntukannya. Permukiman RW 4 tidak terletak pada daerah rawan bencana alam seperti abrasi dan pasang surut air laut. Dengan kelebihan yang dimiliki dibandingkan wilayah RW lain, RW 4 cocok untuk dijadikan salah satu alternatif lokasi pembangunan kawasan permukiman.

B. Status penguasaan bangunan

Status penguasaan bangunan di Kelurahan Kenjeran adalah milik pribadi dan kontrak/kos.

Tabel 4.3 Status Penguasaan Bangunan

No.	Wilayah	Pribadi (%)	Kos/kontrak (%)	Tingkat kekumuhan
1	RW 1	100	0	Tidak kumuh
2	RW 2	97,91	2,09	Tidak kumuh
3	RW 3	87,27	12,73	Kumuh ringan
4	RW 4	100	0	Tidak kumuh

Sumber: Hasil kuesioner, 2013.

Tabel 4.3 menunjukkan wilayah RW 1 dan RW 4 status kepemilikan bangunan adalah milik pribadi. Pada RW 3, 12,73 % kepemilikan bangunan dengan kontrak/kos. Status penguasaan bangunan terdapat pada RW 3 termasuk kategori kumuh ringan dengan presentase 11-30% (**Tabel 3.7**). Kepala keluarga yang memiliki rumah dengan cara sewa, tingkat pendapatan mereka tergolong rendah yaitu <Rp 1.000.000,00. Sebagian besar penghuni tidak mepedulikan keadaan atau kondisi hunian yang mereka sewa. Jika terjadi kerusakan pada hunian, penghuni tidak mepedulikannya karena merasa hal tersebut bukan tanggung jawabnya.

C. Intensitas bencana kebakaran

Berdasarkan data hasil wawancara ketua RW, wilayah di Kelurahan Kenjeran terjadi kebakaran sebanyak satu kali pada tahun 2012. Terjadi pada RW 1, RW 3, dan RW 4. Intensitas bencana kebakaran pada setiap RW termasuk kategori kumuh ringan, karena bencana kebakaran terjadi 1-2 kali/tahun. (**Tabel 3.7**). Kebakaran terjadi karena kebocoran tabung gas elpiji. Api berhasil dipadamkan warga secara bergotong royong dengan menggunakan alat seadanya yaitu karung basah dan tanah.

D. Intensitas bencana banjir

Berdasarkan data hasil wawancara ketua RW, wilayah di Kelurahan Kenjeran terjadi banjir sebanyak 3-4 kali/ tahun pada tahun 2012. Intensitas bencana banjir termasuk kategori kumuh sedang (**Tabel 3.7**). Kegiatan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan tidak rutin diadakan setiap bulan karena kesadaran antar individu masih kurang. Kebiasaan masyarakat yang membuang sampah di laut atau drainase menyebabkan timbulnya banjir.

E. Intensitas bencana abrasi

Intensitas abrasi pantai terjadi 1 kali /1 tahun. Kondisinya termasuk kategori kumuh ringan. (**Tabel 3.7**). Jika terjadi abrasi pantai, pemukiman penduduk yang menghuni sepanjang garis pantai akan terkena dampaknya. Masalah abrasi maupun pencemaran lingkungan sulit untuk diatasi di Kelurahan Kenjeran karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungannya. Banyak masyarakat yang membuang sampah pada sembarang tempat. Perlu diadakan pembangunan tanggul untuk mengurangi dampak negatif akibat abrasi pantai. Abrasi mengenai wilayah RW 1, RW 2 dan sebagian kecil di RW 3.

F. Intensitas bencana puting beliung

Angin puting beliung melanda Kelurahan Kenjeran, tepatnya pada RW 1 dan RW 2. Intensitas bencana puting beliung termasuk kategori kumuh ringan karena terjadi dua kali (**Tabel 3.7**). Tidak terdapat korban jiwa akibat peristiwa tersebut, tetapi sebagian rumah semi permanen dan non permanen mengalami kerusakan. Perusahaan Listrik Negara (PLN) setempat melakukan pemadaman listrik setelah kejadian puting beliung untuk mencegah kebakaran. Sebagian besar perahu yang ditata di bibir pantai terbawa ke tengah laut akibat terjangan angin puting beliung. Hal tersebut berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga nelayan.

G. Intensitas bencana pasang surut air laut

Pasang surut air laut melanda Kelurahan Kenjeran pada RW 1 dan RW 2. Berdasarkan hasil wawancara ketua RW 2, terjadi dua kali pasang surut yang paling parah pada tahun 2012. Tinggi gelombang mencapai >2 meter. Intensitas pasang surut air laut termasuk kategori kumuh ringan (**Tabel 3.7**). Pasang surut yang terjadi di Kelurahan Kenjeran berpotensi untuk meningkatkan intensitas banjir dan kerusakan hutan mangrove.

4.7.2 Kondisi Bangunan

A. Tingkat kualitas struktur bangunan

Tabel 4.4 Jumlah Rumah berdasarkan struktur bangunan

Wilayah	Permanen (unit)	Permanen (%)	Semi permanen (unit)	Semi permanen (%)	Non permanen (unit)	Non permanen (%)	Tingkat kekumuhan
RW 1	190	67,37	86	30,49	6	2,12	Tidak kumuh
RW2	199	71,07	58	20,71	23	8,2	Tidak kumuh
RW 3	169	81,64	38	8,36	0	0	Tidak kumuh
RW 4	58	46,03	68	53,97	0	0	Tidak kumuh

Sumber: Monografi Kelurahan Kenjeran, 2012

Tabel 4.4 menunjukkan penilaian kualitas struktur bangunan Kelurahan Kenjeran. Presentase rumah non permanen adalah 2,12% dan 8,2%, dari jumlah rumah keseluruhan. Nilainya $<10\%$ merupakan kategori tidak kumuh (**Tabel 3.7**). Wilayah RW 2 memiliki presentase yang paling tinggi. Berdasarkan hasil wawancara masyarakat RW 2, rumah hunian mereka sudah memenuhi persyaratan, asal dapat berteduh dan beristirahat. Usaha yang mereka lakukan adalah pengolahan hasil perikanan. Semakin banyak penghuni baik saudara atau tetangga terdekat akan menguntungkan karena tenaganya dibutuhkan membantu usaha.

B. Tingkat kepadatan bangunan

Tabel 4.5 Kepadatan Bangunan

No	Wilayah	Rumah (Unit)	Satuan luas (Ha)	Kepadatan rumah (unit/Ha)	Tingkat kekumuhan
1	RW 1	282	11,23	25,11	Tidak kumuh
2	RW 2	280	8,9	31,46	Tidak kumuh
3	RW 3	207	10,3	20,09	Tidak kumuh
4	RW 4	110	4,3	25,58	Tidak kumuh

Sumber: Hasil pengukuran Arcgis dan Monografi Kelurahan Kenjeran, 2013

Tabel 4.5 menunjukkan kepadatan rumah paling tinggi terdapat pada RW 2 sebesar 31,46 unit/hektar dan kepadatan bangunan yang paling rendah adalah RW 3 yaitu 20,09 unit/hektar. Kepadatan rumah di Kelurahan Kenjeran RW 1-RW 4 merupakan kategori tidak kumuh karena kepadatan bangunan <50 unit/hektar. (**Tabel 3.7**)

C. Kesehatan dan kenyamanan

Kesehatan dan kenyamanan bangunan dinilai berdasarkan kondisi dinding dan sanitasi bangunan yang terdapat di Kelurahan Kenjeran.

Tabel 4.6 Bangunan Rumah Tidak Sehat dan Nyaman

No	Wilayah	Sanitasi dan dinding yang layak (unit)	Sanitasi dan Dinding layak (%)	Sanitasi dan dinding yang tidak layak (unit)	Sanitasi lembab/ jelek dan Dinding tidak layak (%)	Tingkat kekumuhan
1	RW 1	84	87,5	12	12,5	Kumuh ringan
2	RW 2	73	70,08	23	29,92	Kumuh ringan
3	RW 3	44	80	11	20	Kumuh ringan
4	RW 4	17	54,83	14	45,17	Kumuh berat

Sumber: Hasil observasi Kelurahan Kenjeran, 2013.

Tabel 4.6 menunjukkan kondisi kesehatan dan kenyamanan di Kelurahan Kenjeran. Terdapat beberapa rumah warga yang tidak layak seperti kondisi dinding dan sanitasi yang lembab. RW 4 memiliki nilai yang paling tinggi mengenai persentase jumlah bangunan tidak layak yaitu sebesar 45,45%. Termasuk dalam kategori kumuh sedang yaitu antara 31-50% (**Tabel 3.7**).

D. Penggunaan luas bangunan

Tabel 4.7 Penggunaan Luas Bangunan

No.	Wilayah	Luas bangunan rumah(m ²)	Jumlah penghuni rumah	Tingkat penggunaan luas lantai bangunan(m ² /Org)	Tingkat kekumuhan
1	RW 1	17.761,24	1603	11,08	Tidak kumuh
2	RW 2	12.574,22	1193	10,54	Tidak kumuh
3	RW 3	8.739,81	807	10,83	Tidak kumuh
4	RW 4	4608	512	9	Kumuh ringan

Sumber: Hasil pengukuran Arcgis dan Monografi Kelurahan Kenjeran, 2013.

Tabel 4.7 menunjukkan RW 1 memiliki tingkat penggunaan luas lantai paling besar yaitu 11,08 m²/ orang. Wilayah RW 1, RW 2, dan RW 3 termasuk kategori tidak kumuh, karena tingkat penggunaan luas lantai bangunan >10,5m²/ orang (**Tabel 3.7**). Wilayah RW 4 termasuk dalam kategori kumuh ringan karena tingkat penggunaan luas lantai bangunan 8,6-10,5 m²/ orang. (**Tabel 3.7**)

4.7.3 Kondisi sarana dan prasarana dasar

A. Tingkat pelayanan air bersih

Tabel 4.8 Tingkat Pelayanan Air Bersih

No	Wilayah	Pelayanan air bersih				Kondisi kekumuhan
		PDAM (%)	Sungai (%)	Sumur (%)	Tidak mendapat pelayanan air bersih	
1	RW 1	100	-	-	-	Tidak kumuh
2	RW 2	100	-	-	-	Tidak kumuh
3	RW 3	97,2	-	2,8	-	Tidak kumuh
4	RW 4	100	-	-	-	Tidak kumuh

Sumber: Hasil kuesioner, 2013

Tabel 4.8 menunjukkan 97,2% KK warga di Kelurahan Kenjeran mendapatkan pelayanan air bersih dari PDAM. Sebanyak 2,8% KK warga di di RW 3 mempergunakan sumber air sumur dikarenakan saluran air tidak dapat masuk di salah satu rumah warga. Tingkat pelayanan air bersih di Kelurahan Kenjeran termasuk kondisi tidak kumuh karena 100% KK mendapatkan pelayanan air bersih (**Tabel 3.7**)

B. Kondisi sanitasi lingkungan

Kondisi sanitasi lingkungan suatu permukiman mencerminkan kualitas permukiman tersebut. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya sanitasi terlihat dari perilaku masyarakat yang kurang ramah terhadap lingkungan. Hal tersebut terjadi pada masyarakat Kelurahan Kenjeran.

Tabel 4.9 Sanitasi Lingkungan

No	Wilayah	KK memiliki jamban (%)	KK tidak memiliki jamban atau jamban dengan kualitas buruk (%)	Tingkat kekumuhan
1	RW 1	88,54	11,46	Kumuh ringan
2	RW 2	57,29	42,71	Kumuh sedang
3	RW 3	70,90	29,1	Kumuh ringan
4	RW 4	83,8	16,12	Kumuh ringan

Sumber: Hasil kuesioner, 2013.

Tabel 4.9 menunjukkan wilayah RW 2, sejumlah 42,71% KK tidak memiliki sanitasi/kondisi sanitasi buruk. Kondisi kekumuhan adalah kumuh sedang (**Tabel 3.7**). Kondisi sanitasi buruk dilihat dari air bekas mencuci, kakus, dan masak. Saluran tersebut dalam kondisi terbuka, air yang mengalir sangat kotor dari limbah cair maupun sampah. Warga yang tidak memiliki MCK individu memanfaatkan MCK umum di pinggir pantai atau di mushalla yang terletak di lingkungan permukiman penduduk.

C. Kondisi persampahan

Tabel 4.10 Kondisi Persampahan

No	Wilayah	Jasa Pengangkutan Sampah KK mendapat pelayanan (%)	KK tidak mendapat pelayanan (%)	Tingkat kekumuhan
1	RW 1	-	100	Sangat kumuh
2	RW 2	-	100	Sangat kumuh
3	RW 3	100	-	Tidak kumuh
4	RW 4	100	-	Tidak kumuh

Sumber: Hasil kuesioner, 2013.

Kondisi persampahan di Kelurahan Kenjeran belum mendapatkan pelayanan yang cukup optimal karena 50% masyarakat membuang sampah di pekarangan kosong rumah atau di lingkungan permukiman. **Tabel 4.10** menunjukkan 100% KK di RW 1 dan RW 2 warga di Kelurahan Kenjeran tidak mendapatkan jasa pelayanan pengangkutan sampah. Jadi kondisi persampahan termasuk kategori sangat kumuh. (**Tabel 3.7**). Di RW 1 dan RW 2 disediakan bak sampah khusus dari pemerintah untuk pembuangan sampah. Jarak dari rumah ke tempat pembuangan sampah cukup jauh yaitu 500 meter, hal tersebut menjadikan warga tidak membuang sampah di bak khusus. Selain itu warga tidak ingin mengeluarkan biaya untuk iuran jasa pengangkutan sampah karena alasan ekonomi. Sampah industri perikanan sebanyak 89,21% di Kelurahan Kenjeran dibuang di bak sampah yang terletak di dekat pantai. Selain itu, limbah tersebut dijual ke pengepul Rp. 4000,00/ Kg yang dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau kerajinan laut. Kondisi persampahan di RW 3 dan RW 4 sudah baik, karena 100% KK mendapat jasa pelayanan angkutan sampah serta terdapat bak sampah di setiap rumah warga. Jadi kondisi persampahan termasuk tidak kumuh (**Tabel 3.7**) Pada RW 3 biaya iuran adalah Rp. 6.000,00/ bulan untuk satu KK, sedangkan untuk RW 4 biaya iuran adalah Rp. 5.000/ bulan untuk satu KK.

D. Kondisi jalan

Kondisi perkerasan jalan di Kelurahan kenjeran adalah paving. Perkerasan jalan paving merupakan program bantuan dari Pemerintah Kota Surabaya untuk upaya perbaikan jalan di Kelurahan Kenjeran.

Tabel 4.11 Kondisi Jalan

Wilayah	Jalan kondisi baik (m)	Jalan kondisi baik (%)	Jalan kondisi buruk (m)	Jalan kondisi buruk (%)	Tingkat kekumuhan
RW 1	1.855,07	99,95	0,93	0,050	Tidak kumuh
RW 2	997,2	99,2	0,8	0,08	Tidak kumuh
RW 3	1.995,6	99,8	0,4	0,02	Tidak kumuh
RW 4	1.049,59	99,61	0,41	0,039	Tidak kumuh

Sumber: Hasil Observasi Kelurahan Kenjeran, 2013.

Tabel 4.11 menunjukkan pada setiap RW terdapat kerusakan jalan. Kondisi kerusakan tersebut tidak parah. Penyebab utama terjadi kerusakan karena timbulnya genangan air. Semakin lama air menggenang di jalan, semakin cepat

air hujan yang membanjiri merusak jalan paving. Kondisi jalan termasuk dalam kondisi tidak kumuh karena panjang jalan rusak $<10\%$ (**Tabel 3.7**)

E. Besarnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Tidak terdapat taman lingkungan atau lahan terbuka hijau pada setiap RW. Penghijauan merupakan salah satu program yang belum terwujud sesuai dengan keinginan masyarakat Kelurahan Kenjeran.

.Tabel 4.12 Ketersediaan RTH

No	Wilayah	Luas wilayah (Ha)	Luas ruang terbuka (Hq)	Besarnya ruang terbuka (%)
1	RW 1	12	0	0
2	RW 2	9,33	0	0
3	RW 3	11,25	0,21	1,86
4	RW 4	4,51	0	0

Sumber: Hasil Observasi Kelurahan Kenjeran, 2013.

Tabel 4.12 menunjukkan ketersediaan ruang terbuka hijau di RW 1 sampai RW 4 termasuk sangat kumuh karena nilainya $< 2,5\%$. (**Tabel 3.7**)



Gambar 4.15 Kondisi RTH RW 3

Gambar 4.15 menunjukkan kondisi RTH tidak terawat karena dirusak hewan ternak milik warga. Masyarakat serta ketua RW 3 sudah mengingatkan kepada warga pemilik ternak supaya tidak membiarkan hewan ternak berkeliaran di lingkungan permukiman. Namun pemilik hewan tersebut tidak mempedulikan himbauan ketua RW dan tidak menyadari dampaknya terhadap kualitas lingkungan permukiman.

F. Kondisi saluran drainase

Tabel 4.13 Kondisi Saluran Drainase

No	Wilayah	Lancar (m)	Lancar (%)	Tidak Lancar (m)	Tidak lancar (%)	Tingkat Kekumuhan
1	RW 1	1.425,2	76,79	430,8	23,21	Kumuh ringan
2	RW 2	618,3	61,95	379,7	38,05	Kumuh sedang
3	RW 3	409,2	20,5	1.586,8	79,5	Sangat kumuh
4	RW 4	928,95	56,3	721,05	43,7	Kumuh sedang

Sumber: Hasil Observasi Kelurahan Kenjeran, 2013.

Tabel 4.13 menunjukkan kondisi drainase wilayah RW 3 sangat kumuh, karena nilainya $>50\%$ (**Tabel 3.7**). Kerja bakti untuk membersihkan saluran drainase dilakukan satu bulan sekali dan tidak dilakukan secara tidak rutin. Hal tersebut menyebabkan saluran drainase tidak lancar dan tersumbat.

4.7.4 Kependudukan

A. Rata-rata anggota rumah tangga

Tabel 4.14 Jumlah Anggota Rumah Tangga

No	Wilayah	Jumlah penduduk (jiwa)	Jumlah KK	Anggota rumah tangga	Tingkat kekumuhan
1	RW 1	1603	353	5	Kumuh ringan
2	RW 2	1193	350	3	Tidak kumuh
3	RW 3	807	200	4	Tidak kumuh
4	RW 4	512	115	5	Kumuh ringan
Total		4115	1018		

Sumber: Monografi Kelurahan Kenjeran, 2012.

Tabel 4.14 menunjukkan rata-rata anggota rumah tangga di RW 1 dan RW 4 adalah 5 jiwa/KK yang merupakan jumlah tertinggi. Tingkat kekumuhan termasuk kumuh ringan. Sedangkan pada RW 2 dan RW 3 termasuk tidak kumuh karena <5 jiwa/ KK (**Tabel 3.7**).

B. Jumlah KK dalam 1 rumah

Berdasarkan pengamatan hasil survey dalam 1 rumah penduduk hanya terdapat satu KK, tetapi masih ada satu rumah ditempati 2 KK.

Tabel 4.15 Jumlah KK dalam Satu Rumah

No	Wilayah	Jumlah KK	Jumlah rumah	Jumlah KK 1 rumah	Tingkat kekumuhan
1	RW 1	353	282	1	Tidak kumuh
2	RW 2	350	280	1	Tidak kumuh
3	RW 3	200	207	1	Tidak kumuh
4	RW 4	115	110	1	Tidak kumuh

Sumber: Monografi Kelurahan Kenjeran, 2012.

Tabel 4.15 menunjukkan indikator jumlah KK dalam 1 rumah, wilayah RW 1 sampai RW 4 merupakan kategori tidak kumuh karena jumlahnya nilai indikatornya adalah 1 KK/Rumah. (**Tabel 3.7**).

C. Tingkat kepadatan penduduk

Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk, Kelurahan Kenjeran adalah kriteria kota metropolitan. Penjelasan mengenai tingkat kepadatan penduduk terdapat pada **Tabel 3.7**

Tabel 4.16 Tingkat Kepadatan Penduduk

No	Wilayah	Jumlah penduduk (jiwa)	Luas wilayah (Ha)	Tingkat kepadatan penduduk	Tingkat kekumuhan
1	RW 1	1603	12	133,58	Tidak kumuh
2	RW 2	1193	9,33	127,86	Tidak kumuh
3	RW 3	807	11,25	71,73	Tidak kumuh
4	RW 4	512	4,51	113,5	Tidak kumuh

Sumber: Hasil pengukuran Arcgis dan Monografi Kelurahan Kenjeran, 2013.

Tabel 4.16 menunjukkan tingkat kepadatan penduduk yang paling tinggi terdapat di RW 1 yaitu 133,58 jiwa/ Ha. Penduduk di RW 1 sebagian besar terdiri dari usia subur/produktif, sehingga jumlah kelahiran lebih tinggi dibandingkan penduduk yang mayoritas usia non produktif. Tingkat kepadatan penduduk RW 1 sampai RW 4 Kelurahan Kenjeran termasuk permukiman yang tidak kumuh, rentang nilai <250-500 (**Tabel 3.7**)

D. Tingkat pertumbuhan penduduk

Pertumbuhan penduduk RW 1 sampai RW 4 dari jumlah awal tahun dengan jumlah akhir tahun pun tidak berubah dengan jumlah yang signifikan.

Tabel 4.17 Pertumbuhan Penduduk

RW	Jumlah penduduk awal tahun	Jumlah penduduk akhir tahun	Jumlah pertumbuhan penduduk	Pertumbuhan Penduduk (%)	Tingkat kekumuhan
1	1565	1603	13	0,81	Tidak kumuh
2	1160	1193	11	0,92	Tidak kumuh
3	783	807	7	0,86	Tidak kumuh
4	498	512	9	1,75	Kumuh sedang

Sumber: Profil Kecamatan Bulak, 2012

Tabel 4.17 menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk di RW 4 termasuk kumuh sedang dengan rentang nilai 1,6-2% (**Tabel 3.7**). Pertumbuhan penduduk disebabkan karena kelahiran, penduduk di RW 4 sebagian besar terdiri dari usia subur/produktif. Selain itu keinginan untuk memperoleh pekerjaan di RW 4 yaitu sebagai buruh bangunan.

E. Angka kematian kasar

Tabel 4.18 Angka Kematian Kasar

No	Wilayah	Jumlah penduduk (Jiwa)	Jumlah kematian (Jiwa)	Angka kematian kasar (%)	Tingkat kekumuhan
1	RW 1	1603	6	3,74	Tidak kumuh
2	RW 2	1193	3	2,51	Tidak kumuh
3	RW 3	807	4	4,95	Tidak kumuh
4	RW 4	512	2	3,90	Tidak kumuh

Sunber: Monografi Kelurahan Kenjeran, 2012

Tabel 4.18 menunjukkan jumlah kematian penduduk pada tahun 2012 di RW 1 sampai RW 4 termasuk tidak kumuh karena kurang dari 10%. (**Tabel 3.7**) Angka kematian tersebut terjadi penduduk pada usia non produktif.

F. Status gizi balita

Kondisi balita di Kelurahan Kenjeran dilihat dari jumlah balita Bawah Garis Merah (BGM). Terdapat 285 balita di Kelurahan Kenjeran.

Tabel 4.19 Status Gizi Balita

No	Wilayah	Jumlah balita	Jumlah balita BGM	Presentase balita BGM (%)	Tingkat kekumuhan
1	RW 1	70	11	15,7	Kumuh ringan
2	RW 2	112	2	1,78	Tidak kumuh
3	RW 3	90	2	2,22	Tidak kumuh
4	RW 4	30	0	0	Tidak kumuh

Sumber: Posyandu Kelurahan Kenjeran, 2012

Tabel 4.19 menunjukkan 15,7% balita di RW 1 termasuk dalam kondisi garis bawah merah. Kondisi kekumuhan termasuk kumuh ringan dengan rentang nilai 11-30% (**Tabel 3.7**). Pada RW 2, RW 3, dan RW 4 status balita bawah garis merah adalah tidak kumuh karena nilainya <10% (**Tabel 3.7**). Keadaan tersebut mengindikasikan bahwa pengetahuan tentang kesehatan keluarga serta pelayanan dari orang tua telah memenuhi.

G. Angka kesakitan malaria

Tabel 4.20 Kesakitan Malaria

No	Wilayah	Jumlah penduduk (Jiwa)	Angka kesakitan (Jiwa)	Angka kesakitan (%)	Tingkat kekumuhan
1	RW 1	1603	0	0	Tidak kumuh
2	RW 2	1193	2	1,67	Tidak kumuh
3	RW 3	807	5	6,19	Kumuh ringan
4	RW 4	512	1	1,95	Tidak kumuh

Sumber: Puskesmas Kelurahan Kenjeran, 2012

Tabel 4.20 menunjukkan angka kesakitan malaria wilayah RW 3 termasuk kumuh ringan dengan nilai antara 6-10% (**Tabel 3.7**). Berdasarkan hasil

wawancara pihak puskesmas, penyemprotan rumah dan lingkungan pemukiman di Kelurahan Kenjeran tidak dilakukan secara berkala terutama yang berhubungan dengan tempat pembiakan nyamuk (semak-semak dan genangan air).

H. Angka kesakitan diare

Tabel 4.21 Kesakitan Diare

No	Wilayah	Jumlah penduduk (Jiwa)	Jumlah angka kesakitan	Angka kesakitan (%)	Tingkat kekumuhan
1	RW 1	1603	6	3,74	Tidak kumuh
2	RW 2	1193	5	4,19	Tidak kumuh
3	RW 3	807	2	2,47	Kumuh ringan
4	RW 4	512	3	5,85	Tidak kumuh

Sumber: Puskesmas Kelurahan Kenjeran, 2012

Tabel 4.21 menunjukkan angka kesakitan diare RW 1-RW 4 termasuk tidak kumuh dengan rentang nilai $<10\%$. (**Tabel 3.7**). Berdasarkan wawancara dari pihak puskesmas, lingkungan yang buruk dan tingkat kesadaran masyarakat rendah dalam memperhatikan kondisi persampahan. Hal tersebut menjadikan kawasan kumuh di Kelurahan Kenjeran sebagai kawasan yang rawan penyebaran penyakit diare.

I. Angka kesakitan Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA)

Tabel 4.22 Kesakitan ISPA

No	Wilayah	Jumlah penduduk (Jiwa)	Jumlah angka kesakitan	Angka kesakitan (%)	Tingkat kekumuhan
1	RW 1	1603	2	1,24	Tidak kumuh
2	RW 2	1193	14	11,73	Kumuh ringan
3	RW 3	807	4	4,95	Tidak kumuh
4	RW 4	512	3	5,85	Tidak kumuh

Sumber: Puskesmas Kelurahan Kenjeran, 2012

Tabel 4.22 menunjukkan angka kesakitan ISPA wilayah RW 2, kondisinya kumuh ringan dengan rentang nilai 10-30% (**Tabel 3.7**). Penyakit ISPA di Kelurahan Kenjeran disebabkan dua hal. Pertama, berkaitan dengan aktivitas masyarakat yang melakukan pengasapan ikan. Aktivitas tersebut berdekatan dengan permukiman warga dan menimbulkan polusi udara di lingkungan. Kedua, berkaitan dengan kondisi rumah masyarakat yang tidak sehat. Kondisi rumah tidak sehat karena kondisi ventilasi dan penghawaan di rumah yang tidak memadai.

J. Angka kesakitan demam berdarah

Tabel 4.23 Kesakitan Demam Berdarah

No	Wilayah	Jumlah penduduk (Jiwa)	Jumlah angka kesakitan	Angka kesakitan (%)	Tingkat kekumuhan
1	RW 1	1603	2	1,24	Tidak kumuh
2	RW 2	1193	3	2,51	Tidak kumuh
3	RW 3	807	1	4,95	Tidak kumuh
4	RW 4	512	4	7,81	Kumuh ringan

Sumber: Puskesmas Kelurahan Kenjeran, 2012

Tabel 4.23 menunjukkan angka kesakitan demam berdarah di RW 4 termasuk kategori kumuh ringan dengan rentang nilai 6-10% (**Tabel 3.7**). Berdasarkan hasil wawancara pihak puskesmas, penyebab demam berdarah di Kelurahan Kenjeran adalah kondisi lingkungan yang kumuh dan tidak terawat sehingga menjadi tempat bersarangnya nyamuk. Salah satunya di tempat penampungan air yang tidak tertutup.

4.7.5 Sosial ekonomi

A. Tingkat kemiskinan

Tingkat kemiskinan ditunjukkan dengan jumlah KK prasejahtera dengan jumlah KK sejahtera 1. Berdasarkan data Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), jumlah KK Prasejahtera dan sejahtera 1 sejumlah 297 KK

Tabel 4.24 KK prasejahtera dan sejahtera 1

No	Wilayah	Jumlah KK	Jumlah KK prasejahtera dan sejahtera 1	Presentase KK prasejahtera dan sejahtera 1 (%)	Tingkat kekumuhan
1	RW 1	353	63	17,84	Kumuh sedang
2	RW 2	350	150	42,85	Sangat kumuh
3	RW 3	200	52	26	Kumuh berat
4	RW 4	115	32	27,82	Kumuh berat

Sumber: Data JAMKESMAS Kelurahan Kenjeran, 2012.

Tabel 4.24 menunjukkan tingkat kemiskinan di RW 2 termasuk kategori sangat kumuh dengan nilai >35% (**Tabel 3.7**). Di Kelurahan Kenjeran, sebanyak 80% penduduknya bekerja sebagai wiraswasta (pedagang), buruh dan sebagai nelayan. Mereka memiliki pendapatan di bawah rata-rata dan berpengaruh terhadap upaya pemenuhan hidup sehari-hari. Selain itu, masyarakat miskin di Kelurahan Kenjeran memiliki kelemahan dalam usaha kegiatan sosial ekonomi dan pendidikan yang layak.

B. Pendapatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jatim no 72 tahun 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kota di Jawa Timur, upah minimum Kabupaten/ Kota Surabaya adalah Rp 1.740.000,00. Nilai kekumuhan pendapatan dihitung berdasarkan presentase jumlah penduduk yang penghasilannya di bawah UMK terhadap jumlah penduduk.

Tabel 4.25 Jumlah Pendapatan Masyarakat

No	Wilayah	Pendapatan Masyarakat				Jumlah penduduk dibawah UMK/UMR (%)	Tingkat Kekumuhan
		≤ Rp 600.000,00 (%)	Rp 600.000- 1.170.000 (%)	Rp 1.170.000- 1.740.000 (%)	> Rp 1.740.000 (%)		
1	RW 1	93,75	3,125	2,08	1,045	98,95	Sangat kumuh
2	RW 2	94,79	3,125	2,085	-	100	Sangat kumuh
3	RW 3	90,90	3,63	3,63	1,84	98,16	Sangat kumuh
4	RW 4	67,74	9,67	16,12	6,47	93,53	Sangat kumuh

Sumber: Hasil kuesioner, 2013.

Tabel 4.25 menunjukkan tingkat pendapatan di Kelurahan Kenjeran yang paling tinggi yaitu Rp. ≤600,000.00. Jumlah pendapatan sangat jauh dibandingkan dengan upah minimum kota/kabupaten. Minimnya kemampuan perekonomian, mendorong masyarakat untuk lebih mengesampingkan peningkatan mutu lingkungan demi kebutuhan mereka sehari-hari. Tingkat pendapatan termasuk kategori sangat kumuh karena 35% pendapatan penduduk di bawah upah minimum kota/kabupaten. (**Tabel 3.7**)

C. Pendidikan

Tabel 4.26 Tingkat Pendidikan

No	Wilayah	Jumlah penduduk (Jiwa)	Jumlah penduduk yang tidak tamat Pendidikan Dasar 9 Tahun	Presentase penduduk yang tidak tamat Sekolah dasar (%)	Tingkat kekumuhan
1	RW 1	1603	76	4,74	Kumuh ringan
2	RW 2	1193	54	4,52	Kumuh ringan
3	RW 3	807	97	12,01	Kumuh berat
4	RW 4	512	58	11,38	Kumuh berat
Total			285		

Sumber: Profil Kecamatan Bulak, 2012

Tingkat pendidikan di Kelurahan Kenjeran dilihat dari jumlah penduduk yang tidak tamat pendidikan dasar 9 tahun. **Tabel 4.26** menunjukkan 12,01% warga di RW 3 dan 11,38% warga di RW 4 tidak tamat pendidikan dasar 9 tahun. Kondisi kekumuhan termasuk kumuh berat dengan rentang nilai 11-15% (**Tabel 3.7**). Rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan sulitnya masyarakat merawat hasil pembangunan secara benar sehingga menimbulkan kondisi lingkungan permukiman menjadi kumuh.

D. Tingkat kerawanan keamanan

Tingkat kerawanan keamanan ditunjukkan oleh banyak sedikitnya kejadian kriminalitas yang mempengaruhi kenyamanan untuk bertempat tinggal.

Tabel 4.27 Kerawanan Keamanan

No	Wilayah	Jumlah kejadian	Tingkat kekumuhan
1	RW 1	5	Kumuh berat
2	RW 2	-	Tidak kumuh
3	RW 3	5	Kumuh berat
4	RW 4	5	Kumuh berat

Sumber: Hasil wawancara, 2013.

Tabel 4.27 menunjukkan terjadi 5 kali tindakan kriminalitas pada tahun 2012 di RW 1, RW 3 dan RW 4. Kondisi kekumuhan termasuk kumuh berat (**Tabel 3.7**). Pada RW 2 tidak terjadi kerawanan keamanan. Tindakan kriminalitas di Kelurahan Kenjeran yaitu pencurian motor dan sepeda milik warga. Di Kelurahan Kenjeran tidak terdapat pos keamanan dan tidak pernah diadakan kegiatan ronda malam. Keamanan lingkungan merupakan salah satu harapan yang diinginkan oleh masyarakat Kelurahan Kenjeran.

4.7.6 Pembobotan Indeks Kekumuhan

Pembobotan indeks kekumuhan merupakan hasil perhitungan tingkat kekumuhan dan dinilai pada masing-masing indikator. Di Kelurahan Kenjeran diperoleh dari perhitungan tiap RW. Hasil penilaian tersebut diperoleh dari perkalian nilai indikator dan bobot indikator. Dari hasil penjumlahan bobot nilai 31 indikator, Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak termasuk dalam kategori kumuh ringan dengan indeks kekumuhan 1,96/rentang nilai 1,86-2,1675 (**Lampiran 4**). Wilayah RW 2 adalah wilayah yang indeks tingkat kekumuhan paling tinggi yaitu 2,1675. Masyarakat RW 2 memiliki tingkat kekumuhan tertinggi dalam hal pendapatan karena 100% masyarakatnya memiliki penghasilan di bawah upah minimum kota. Sebagian besar bekerja pada sektor informal yaitu nelayan, penjual hasil laut, dan pedagang kelontong.

Masyarakat memiliki kemampuan akademis dan teknis yang rendah sehingga daya serap tenaga kerja di sektor formal terbatas. Pendapatan yang tergolong rendah hanya dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga sehari-hari sehingga masyarakat setempat tidak dapat berperan aktif dalam perbaikan lingkungan permukiman.

Berdasarkan aspek sarana prasarana, kondisi persampahan dan sanitasi RW 2 paling kumuh. Tidak terdapat jasa pelayanan angkutan sampah dan bak sampah di setiap rumah warga. Masyarakat membuang sampah pada tempat yang tidak sesuai seperti saluran drainase, pinggir pantai atau pekarangan rumah yang kosong. Kondisi tersebut dapat mengganggu kesehatan warga yang bermukim. Sebanyak 42,71% rumah penduduk tidak memiliki sanitasi/atau memiliki sanitasi dengan kondisi yang buruk. Warga memanfaatkan jamban di pinggir pantai yang tidak layak dan jamban yang terdapat di mushala.

Ketidaksesuaian lahan untuk permukiman di RW 2 adalah 64,30%, merupakan kondisi yang paling kumuh. Hal tersebut menunjukkan wilayah RW 2 rentan terhadap bencana abrasi pantai dan puting beliung. Presentase rumah non permanen paling besar dibandingkan wilayah RW lain. Masyarakat memiliki rumah dengan kondisi kurang layak. Mereka memiliki sikap tidak peduli atau acuh tak acuh dari kondisi huniannya. Bagi mereka menghuni rumah tidak permanen atau tidak layak bukan sesuatu yang membahayakan kesehatan karena sudah menjadi tradisi. Hal ini menjadi pemicu munculnya sikap malas dan kurang kemauan untuk memperbaiki kondisi hunian secara swadaya

Wilayah RW 4 adalah wilayah yang memiliki indeks tingkat kekumuhan paling rendah yaitu 1,86. Presentase masyarakat yang memiliki pendapatan di bawah upah minimum kota merupakan paling rendah yaitu 93,53% (**Tabel 4.25**) dibandingkan wilayah RW 1, RW 2, dan RW 3. Masyarakat bekerja pada sektor formal dan informal serta mampu memanfaatkan peluang usaha mandiri untuk menunjang perekonomian keluarga. Keseluruhan lahan permukiman di RW 4 sesuai dengan peruntukannya. Tidak terdapat lahan permukiman yang melanggar garis sempadan pantai, sehingga potensi untuk terkena dampak bencana rendah. Kondisi struktur bangunan adalah permanen dan semi permanen, tidak terdapat bangunan non permanen. Berpotensi untuk melindungi penghuni dari bahaya kebakaran. Terkait aspek sarana prasarana, kondisi persampahan di RW 4 sudah baik. 100% KK mendapat jasa pelayanan angkutan sampah dan terdapat bak sampah di setiap rumah warga. Pada RW 4 biaya iuran adalah Rp. 5.000.00/ bulan

untuk satu KK. Kondisi tersebut berbeda dengan warga di RW 2 yang tidak ingin mengeluarkan biaya untuk jasa pengangkutan sampah karena permasalahan ekonomi.

4.8 Analisis Hirarki Proses (AHP)

Teknik analisis data dengan AHP dalam penelitian “ Prioritas Program Penataan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kenjeran” dianalisis menggunakan software Expert Choiche 11. Sampel yang digunakan untuk AHP adalah lima ahli yaitu:

- Expert 1: Akademisi (Laboratorium Perumahan dan Permukiman ITS)
- Expert 2: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya (Bidang permukiman)
- Expert 3: Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Hidup Kota Surabaya
- Expert 4: Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Surabaya
- Expert 5: Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Surabaya

4.8.1 Tingkat prioritas parameter peremajaan kawasan dengan pendekatan revitalisasi.

Tabel 4.28 Tingkat Prioritas Revitalisasi berdasarkan Ahli

Parameter	Prioritas Parameter berdasarkan ahli Ahli (%)					
	Akademisi	Dinas Cipta Karya Tata Ruang	LSM	BLH	BAPPEKO	Gabungan
Sarana prasarana	1,2	6,9	2,1	2,1	5,2	3,5
Partisipasi masyarakat	11,4	1,8	9,4	10,2	15,9	10,2
Kepadatan fisik	11,2	1,8	1,2	10,5	1,5	4,2
Budaya	11,2	1,8	9,4	10,2	7,7	8,7
Degradasi lingkungan	11,2	1,8	9,8	10,5	2,9	7,2
Kepemilikan tanah	4	2,1	10,1	10,2	18,5	8,7
Komitmen pemerintah setempat	11,4	15,7	10,1	10,5	15,1	15,7
Lapangan kerja	11,2	3,6	9,8	2,1	1,3	5
Unit ruang usaha	11,2	15,7	9,4	2,1	1,3	6,9
Kepadatan penduduk	4	15,7	1	10,2	14	7,8
Diversifikasi usaha	4	15,7	9,1	1	1,3	4,8
Lokasi	4	15,7	9,3	10,2	14	12,4
Kawasan strategis	4	1,7	9,3	10,2	1,3	4,9

A. Akademisi

Parameter utama yang menjadi prioritas menurut akademisi adalah komitmen pemerintah setempat dan partisipasi masyarakat sebesar 11,4%, nilai ketidakkonsistennya 1% (**Lampiran 7**). Komitmen pemerintah serta partisipasi menjadi prioritas dalam pelaksanaan revitalisasi. Partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan mengenai upaya perbaikan permukiman. Sarana dan prasarana fisik kondisinya bertambah buruk yaitu kondisi persampahan dan sanitasi di Kelurahan Kenjeran. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan fisik lebih difokuskan pada hasil daripada proses pembangunannya. Dampak yang ditimbulkan akibat rendahnya partisipasi adalah ketergantungan dan ketidakberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraannya sendiri. Komitmen pemerintah lebih difokuskan dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan fisik. Pemerintah lebih cv terbuka dalam memperhatikan aspirasi masyarakat sehingga pembangunan fisik yang dibangun menjadi keperluan masyarakat secara prioritas dan menyeluruh. Wujud perhatian pemerintah dapat dilakukan dengan pendampingan/ peningkatan pendidikan non formal bagi masyarakat di Kelurahan Kenjeran yang dilakukan secara berkala.

B. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya

Parameter utama yang menjadi prioritas menurut Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya adalah komitmen pemerintah setempat, unit ruang usaha, kepadatan penduduk, diversifikasi usaha, dan lokasi yaitu sebesar 15,7%, nilai ketidakkonsistennya 3% (**Lampiran 7**). Dalam diversifikasi usaha, penyuluhan pengetahuan untuk mengelola usaha masih perlu peningkatan, misalnya dalam hal penciptaan keuntungan bagi masyarakat Kelurahan Kenjeran yang mayoritas sebagai wiraswasta. Unit ruang usaha di Kelurahan Kenjeran adalah unit usaha keluarga, sehingga jaringan usaha dan produk terbatas. Hal ini dikarenakan pelaku usaha hanya mengandalkan modal pribadi yang jumlahnya terbatas. Pihak Dinas Cipta Karya beranggapan bahwa kepadatan penduduk perlu menjadi perhatian. Pertimbangannya, penanganan kepadatan penduduk diusahakan untuk mewujudkan ketersediaan fasilitas umum yang memiliki peranan strategis dalam kehidupan sosial penduduk. Apabila kehidupan sosial minim fasilitas berdampak pada kegiatan ekonomi dan menimbulkan kemiskinan. Kemiskinan tersebut disebabkan kurang berkembangnya kreatifitas masyarakat untuk

membuka lapangan pekerjaan sendiri. Lokasi permukiman di Kelurahan Kenjeran sesuai dengan RDTRK Kecamatan Bulak. Tetapi berdasarkan kesesuaian lahan permukimannya, sebagian wilayah permukiman di Kelurahan Kenjeran terdapat ketidaksesuaian lahan untuk permukiman yang melanggar garis sempadan pantai sejauh 100 meter. Hal tersebut dapat menjadi penghambat untuk pelaksanaan program revitalisasi permukiman. Perlu peningkatan kapasitas pemerintah daerah melalui komitmen menetapkan kawasan prioritas permukiman dengan peningkatan kualitas sosial komunitas masyarakat.

C. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Hidup Surabaya

Parameter utama yang menjadi prioritas menurut LSM adalah komitmen pemerintah setempat dan kepemilikan tanah sebesar 10,1%, nilai ketidakkonsistennya 2% (**Lampiran 7**). Status kepemilikan tanah merupakan hal utama dalam penataan permukiman. Pemanfaatan lahan untuk perumahan dan permukiman di belum sepenuhnya berpedoman pada RTRW/ RDTRK, sehingga pengembangannya cenderung menciptakan pembangunan yang tidak terpola. Hal tersebut berpengaruh pada kepemilikan tanah untuk perumahan permukiman yang tidak memberikan keadilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Minimnya sumber daya dan sarana prasarana yang memadai serta pendanaan merupakan penyebab lainnya keruwetan dalam pengelolaan tanah. Pemerintah perlu menyusun kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan lahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang belum terpecahkan sampai saat ini, masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh adalah memperoleh kejelasan hak atas tanah dan hunian yang layak.

D. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Surabaya

Parameter utama yang menjadi prioritas menurut BLH adalah kepadatan fisik, degradasi lingkungan, dan komitmen pemerintah setempat sebesar 10,5%, nilai ketidakkonsistennya 1%. (**Lampiran 7**). Wilayah pesisir Kelurahan Kenjeran memiliki sensitifitas tinggi terhadap degradasi lingkungan apabila pembangunan eksploitasi dilakukan secara berlebihan. Penyebab degradasi tersebut karena pengaruh aktivitas manusia serta pengerukan pasir yang dilakukan masyarakat. Hal tersebut berdampak terhadap penyempitan kawasan bagi masyarakat yang tinggal bermukim dekat pantai. Faktor ekonomi serta pendidikan yang rendah mendasari nelayan untuk merusak sumber daya pesisir. Kondisi tersebut membuat nelayan tidak menyadari telah melakukan kerusakan lingkungan.

Kesadaran masyarakat untuk menjaga hutan mangrove masih kurang, padahal mangrove memiliki peranan penting untuk mencegah terjangan ombak. Kepadatan fisik adalah nilai koefisien dasar bangunan (KDB) dan koefisien lantai bangunan (KLB). Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya tahun 2007, KDB maksimal adalah 60%. Rata-rata besarnya KDB perumahan di Kelurahan Kenjeran adalah 80-90%. Dari hal tersebut diketahui, pembangunan fisik permukiman tidak terkendali. Dampak tersebut adalah penyimpangan terhadap ketentuan koefisien dasar bangunan yang berkaitan langsung dengan berkurangnya area hijau. Lahan kapling yang terbatas cenderung mengabaikan peraturan yang ditetapkan seharusnya. Upaya yang dilakukan dengan meninjau kembali regulasi/kebijakan standart penentuan KDB yang diizinkan pada kawasan permukiman.

E. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (BAPPEKO)

Parameter utama yang menjadi prioritas menurut BAPPEKO adalah kepemilikan tanah sebesar 18,5%, nilai ketidakkonsistennya 6% (**Lampiran 7**). Upaya paling besar pemerintah dalam penataan ruang serta pembangunan perumahan dan permukiman adalah memberdayakan peran masyarakat supaya mampu memenuhi kebutuhan pokok perumahan tanpa merusak lingkungan hidup. Pengendalian kepemilikan tanah terhambat oleh keadaan lain yang menyimpang, sehingga menghambat pemerintah untuk memperoleh informasi tentang penguasaan dan kepemilikan tanah.

F. Gabungan lima responden AHP

Tingkat prioritas parameter revitalisasi berdasarkan lima responden adalah komitmen pemerintah setempat sebesar 15,7% (**Lampiran 7**). Komitmen pemerintah setempat memiliki peran sangat besar dalam terselenggaranya revitalisasi permukiman. Kebutuhan permukiman merupakan kebutuhan yang paling mendesak sampai sekarang. Salah satu penyebab lambatnya upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat adalah terbatasnya kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan. Hal tersebut dapat dijadikan peluang yaitu meningkatkan koordinasi dalam pembangunan perumahan dan permukiman khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.. Untuk menghadapi tantangan tersebut diperlukan kebijakan pemerintah sebagai terobosan, yaitu dengan melibatkan peran serta masyarakat, lembaga dan pihak swasta. Dalam mendukung kebijakan, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman dan

pengetahuan serta persamaan persepsi tentang mekanisme kerjasama pemerintah-swasta.

4.8.2 Tingkat prioritas parameter *Kampung Improvement Program Komprehensif* (KIP-K)

Tabel 4.29 Tingkat Prioritas KIP-K berdasarkan Ahli

Parameter	Prioritas Parameter berdasarkan ahli Ahli (%)					
	Akademisi	Dinas Cipta Karya Tata Ruang	LSM	BLH	BAPPEKO	Gabungan
Sarana prasarana	1,7	5,5	1,2	4,9	6,5	3,9
Yayasan kampung	16,1	1,9	4,9	6,3	2,1	5,5
Koperasi serba usaha	5,9	1,9	5,7	1,7	1,6	3,5
Komitmen pemerintah setempat	16,1	1,9	13,3	22,5	1,7	8,5
Pendidikan	5,8	16,2	12,3	4,3	16,4	11,9
Kesehatan	5,8	16,6	14,2	4,6	17,6	12,5
Partisipasi masyarakat	5,8	5,4	12	22,2	17,2	13,5
Pinjaman bergulir	5,8	1,3	1,2	4,7	1,7	2,9
Legalitas tanah	15,8	16,6	11,4	1,7	16,1	11,6
Izin bangunan	15,8	16,2	11,5	4,7	1,8	9,4
Pemberdayaan masyarakat	5,8	16,6	12,3	22,5	17,2	16,8

A. Akademisi

Parameter utama yang menjadi prioritas menurut akademisi adalah yayasan kampung dan komitmen pemerintah setempat yaitu 16,1%, nilai tidak konsisten adalah 1% (**Lampiran 7**). Tidak berkembangnya operasionalisasi yayasan kampung di Kelurahan Kenjeran karena pada awal program berjalan yayasan kampung lebih banyak terlibat dalam hal pembangunan fisik lingkungan yang mengelola dana hibah. Sewaktu program berakhir, dana telah terserap dan kegiatan yayasan kampung juga berakhir. vvggggKomitmen pemerintah setempat sebagai penggerak roda ekonomi hendaknya ikut mendukung keberadaan yayasan kampung untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kelurahan Kenjeran. Pemerintah bersama-sama masyarakat di wilayah tersebut memilih pengurus yayasan kampung tentunya yang memiliki kualitas sumber daya

manusia yang profesional. Maka dari itu, sebelumnya dilaksanakan pembekalan terhadap masyarakat secara berkala.nnjjjjjjjjjjj

B. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya

Parameter utama yang menjadi prioritas menurut Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota adalah legalitas tanah, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat sebesar 16,6%, nilai ketidakkonsistenannya 3% (**Lampiran 7**). Legalitas tanah di Kelurahan Kenjeran diakui statusnya oleh Pemerintah Kota Surabaya, namun kondisi ekonomi dan pendidikan yang rendah, sehingga lingkungan permukiman menjadi kotor. Secara fisik masih dimungkinkan untuk melakukan perbaikan, tidak harus melakukan perombakan yang mandasar atau menggusur. Perhatian pemerintah dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan uang untuk memperbaiki rumah melalui program rumah swadaya. Program pemberdayaan masyarakat belum berjalan dengan efektif. Hal tersebut terlihat dari kurangnya sumber daya pihak pelaksana program pemberdayaan masyarakat dan rata-rata tingkat pendidikan rendah. Hal ini mengakibatkan sulitnya penyampaian informasi progam program pemberdayaan masyarakat sebagai sasaran pemberdayaan masyarakat miskin. Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pihak pelaksana perlu mendapatkan pelatihan-pelatihan tentang bimbingan terhadap masyarakat yang akan diikuti dalam kegiatan program pemberdayaan masyarakat. Lingkungan yang sehat tidak diperhatikan karena kesibukan dalam bekerja sehingga lingkungan sekitar tidak dijaga kebersihannya. Dampak dari lingkungan yang tidak sehat dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Kondisi kesehatan masyarakat Kelurahan Kenjeran bermasalah karena kesakitan malaria, diare, demam berdarah dan ISPA termasuk kategori kumuh ringan pada salah setiap RW nya. Maka dari itu, perlu melakukan kerja sama dan menerapkan program terpadu di antara masyarakat Kelurahan Kenjeran dan institusi pemerintah/non pemerintah dalam menghadapi bencana atau wabah penyakit.

C. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Hidup Surabaya

Parameter utama yang menjadi prioritas menurut LSM adalah kesehatan sebesar 14,2%, nilai ketidakkonsistenannya 3% (**Lampiran 7**). Indikator kesehatan merupakan hal yang berpengaruh pada pengembangan bidang sosial dalam rangka perbaikan lingkungan. Masyarakat sering mengabaikan kebutuhan pelayanan untuk kesehatan. Pengurangan pengeluaran biaya kesehatan lebih

banyak dilakukan, karena kesehatan bukan tujuan masyarakat. Perhatian mereka lebih terfokus kepada kegiatan yang berhubungan dengan pencarian nafkah. Hal tersebut terjadi pada kondisi masyarakat di Kelurahan Kenjeran. Mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai wiraswasta dengan penghasilan jauh di bawah UMR Kota Surabaya. Maka dari itu, peningkatan pembinaan kesehatan pemukiman difokuskan kepada pembinaan swadaya masyarakat.

D. Badan Lingkungan Hidup Kota (BLH) Surabaya

Parameter utama yang menjadi prioritas menurut BLH adalah komitmen pemerintah setempat dan pemberdayaan masyarakat sebesar 22,5%, nilai ketidakkonsistennya 2% (**Lampiran 7**). Komitmen pemerintah dan pemberdayaan masyarakat perlu diperhatikan dalam program KIP-K. Warga Kelurahan Kenjeran pernah mendapatkan bantuan KIP-K pada tahun 2003, tetapi pelaksanaannya tidak berkelanjutan. Hal ini menunjukkan pemerintah belum sepenuhnya mewujudkan komitmen perbaikan permukiman. Dibutuhkan komitmen bersama baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat di Kelurahan Kenjeran dengan visi misi yang sama. Dari segi sosial ekonomi masyarakat, program berbasis masyarakat yang pernah diterima warga Kelurahan Kenjeran belum menunjukkan hasil yang optimal dalam memecahkan masalah kemiskinan. Program pemberdayaan masyarakat lebih difokuskan pada aspek fisik daripada aspek non fisik dengan ukuran dampak/ proses. Masyarakat berpenghasilan rendah Kelurahan Kenjeran perlu diberdayakan karena mengalami kelemahan kemandirian. Diperlukan program khusus untuk masyarakat kalangan bawah yang tidak menerima manfaat.

E. Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Surabaya

Parameter utama yang menjadi prioritas menurut BAPPEKO adalah kesehatan sebesar 17,6%, nilai ketidakkonsistennya 2% (**Lampiran 7**). Aspek kesehatan dinilai penting dalam pelaksanaan program KIP-K. Masyarakat di Kelurahan Kenjeran tinggal di kawasan pesisir, memiliki risiko kesehatan yang tinggi sehingga perlu diberikan perhatian khusus dalam upaya pembangunan kesehatan. Pihak BAPPEKO beranggapan, perlu dilakukan penyuluhan kesehatan masyarakat dan pembinaan peran serta masyarakat. Pendekatan dilakukan melalui puskesmas tingkat kelurahan, dimana setiap individu atau kelompok masyarakat dibantu untuk melakukan tindakan-tindakan yang tepat dalam mengatasi kesehatan mereka sendiri.

F. Gabungan lima responden AHP

Parameter yang menjadi prioritas berdasarkan gabungan lima responden adalah pemberdayaan masyarakat sebesar 16,8%, nilai ketidakkonsistennya 1% (**Lampiran 7**). Pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan KIP-K. Keterbatasan kapasitas masyarakat dalam peningkatan kualitas permukiman menunjukkan kondisi ketidakberdayaan masyarakat. Dibutuhkan peran organisasi yang menjadi fasilitator dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Di Kelurahan Kenjeran karakteristik masyarakat tergolong berpenghasilan rendah. Kondisi tersebut menjadi salah satu tujuan dari kegiatan KIP-K untuk membangun kemandirian masyarakat yang berkelanjutan. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat perlu pendampingan dan pelatihan yang terfokus pada peningkatan kualitas permukiman. Diperlukan peran Pemerintah Kota Surabaya sebagai fasilitator antara masyarakat permukiman Kelurahan Kenjeran dengan instansi lain yang terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat.

4.8.3 Tingkat prioritas parameter pengembangan masyarakat dengan Tridaya

Tabel 4.30 Tingkat Prioritas Tridaya berdasarkan Ahli

Parameter	Prioritas Parameter berdasarkan ahli Ahli (%)					
	Akademisi	Dinas Cipta Karya Tata Ruang	LSM	BLH	BAPPEKO	Gabungan
Sarana prasarana	2,5	6,2	2,2	4	6,6	4,4
Kelembagaan KSM	10,9	2	1,2	1,8	2	2,9
Komitmen pemerintah setempat	10,9	22,3	12,3	16,4	23,6	19,2
Pemenuhan hak dasar	10,9	5,7	12,3	18,1	5,4	11,1
Pendidikan	10,9	22,3	12,3	2,9	23,6	13,5
Kesehatan	10,9	22,3	12,3	2,9	23,6	13,6
Partisipasi masyarakat	10,9	5,7	12,3	17,5	5,4	11,1
Penanggulangan bencana	10,5	5,7	11,8	17,5	5,4	10,9
Pengembangan kapasitas	10,5	5,7	12,3	17,5	2	9
Pinjaman bergulir	10,9	2	11,2	1,4	2	4,3

A. Akademisi

Parameter yang menjadi prioritas menurut akademisi adalah kelembagaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), komitmen pemerintah setempat, pemenuhan hak dasar, pendidikan, kesehatan, partisipasi masyarakat dan pinjaman bergulir sebesar 10,9% (**Lampiran 7**). Diperlukan peningkatan kinerja komitmen pemerintah dalam menghadapi permasalahan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat serta penanganan masalah permukiman kumuh. Dalam mewujudkan komitmen yang baik pemerintah hendaknya berupaya menemukan langkah-langkah untuk melibatkan kelompok miskin pada permukiman kumuh, sehingga kebutuhan mereka dapat direfleksikan dalam kebijakan dan program-program pemerintah kota. Pada pengentasan masyarakat dari kemiskinan, pemerintah seharusnya meletakkan sasaran utamanya kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang tergolong kalangan ekonomi lemah untuk ditumbuhkan kemandiriannya. Bukan masyarakat miskin secara perseorangan yang akan diberdayakan. Pelaksanaan pinjaman bergulir Kelurahan Kenjeran tidak sepenuhnya dapat optimal. Untuk menghindari penggunaan dana pinjaman bergulir yang tidak sesuai peruntukannya, maka perlu dilakukan kegiatan penyuluhan tentang penggunaan pinjaman bergulir tepat guna dari pemerintah setempat. Hasil dari kegiatan program perbaikan permukiman Kelurahan Kenjeran masih dominan dari pemerintah. Kehadiran/keinginan masyarakat dalam berpartisipasi untuk mensukseskan program perbaikan permukiman masih rendah. Kurangnya keinginan masyarakat untuk mengikuti kegiatan partisipatif mengindikasikan kemandirian masyarakat masih menjadi permasalahan. Pendidikan dan kesehatan adalah aspek lain yang perlu diperhatikan dalam tridaya. Sebanyak $\pm 50\%$ Masyarakat Kelurahan Kenjeran mendapatkan pelayanan kesehatan di bawah standar karena keterbatasan tenaga petugas kesehatan memberikan pelayanan. Di sisi lain pembiayaan untuk kesehatan serta kesadaran masyarakat berperilaku sehat masih minim. Diperlukan promosi kesehatan dan memberikan pelatihan. Kegiatannya dengan identifikasi masalah kesehatan yang terjadi pada lingkungan permukiman, disepakati masyarakat melalui musyawarah tingkat kelurahan. Apabila hal tersebut terwujud, upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan dapat lebih cepat dan efektif karena masyarakat mampu mandiri. Kondisi pendidikan masyarakat yang tidak tamat pendidikan dasar 9 tahun disebabkan salah satunya oleh faktor internal

keluarga yaitu orang tua yang tidak memberikan kesempatan untuk bersekolah. Mayoritas masyarakat berpenghasilan rendah. Orang tua lebih menginginkan anaknya membantu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

B. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya

Parameter utama yang menjadi prioritas menurut Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota adalah komitmen pemerintah setempat, pendidikan, dan kesehatan sebesar 22,3%, nilai ketidakkonsistenannya 1% (**Lampiran 7**). Komitmen pemerintah perlu ditingkatkan kinerjanya dalam hal pendidikan dan kesehatan. Dalam peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan terdapat kendala yaitu pemahaman tentang standar yang layak. Kapasitas dari pemerintah dan masyarakat belum optimal. Di sisi lain, koordinasi antar instansi dan swasta dalam implementasi program belum memiliki kelembagaan yang terstruktur. Perlu dilakukan perlindungan dan peningkatan terhadap kesehatan, terutama kondisi sanitasi di Kelurahan Kenjeran yang tidak memadai. Pembangunan pendidikan ternyata belum sepenuhnya mampu memberi pelayanan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat, $\pm 20\%$ masyarakat di Kelurahan Kenjeran tidak tamat pendidikan dasar 9 tahun. Keterbatasan masyarakat miskin mengakses layanan pendidikan dasar disebabkan tingginya beban biaya pendidikan, baik biaya langsung maupun tidak langsung.

C. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Hidup Surabaya

Parameter utama yang menjadi prioritas menurut LSM adalah komitmen pemerintah setempat, pemenuhan hak dasar, pendidikan, kesehatan, partisipasi masyarakat serta pengembangan kapasitas sebesar 12,3%, nilai ketidakkonsistenannya 3% (**Lampiran 7**). Pengembangan kapasitas dan pendidikan menjadi aspek yang diperhatikan. Mengenai kebutuhan pendidikan sebagian penduduk di Kelurahan Kenjeran beranggapan bahwa pendidikan yang ditempuh tidak menjamin peningkatan taraf hidup keluarga, hanya mengeluarkan pendapatan sia-sia karena pendapatan mereka jauh di bawah upah minimum kota. Hal tersebut mengakibatkan anak-anak usia sekolah dasar tidak dapat melanjutkan pendidikan dan terpaksa membantu keluarga untuk mencari nafkah. Masyarakat di Kelurahan Kenjeran umumnya menghadapi permasalahan terbatasnya kesempatan kerja dan terbatasnya peluang mengembangkan usaha. Selain itu, ketrampilan yang mereka miliki kurang. Kekurangan tersebut menyebabkan masyarakat melakukan pekerjaan kurang memadai. Apabila

masyarakat memiliki pendidikan cukup, tetapi tidak mempunyai keterampilan tambahan, sulit mendapatkan penghasilan atau pekerjaan. Pengembangan kapasitas masyarakat melalui pelatihan keterampilan disesuaikan dengan sumber daya manusia, apabila mereka sudah terampil, maka dapat memenuhi kebutuhan hidup.

D. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Surabaya

Parameter utama yang menjadi prioritas menurut BLH adalah pemenuhan hak dasar sebesar 18,1%, nilai ketidakkonsistennya 4% (**Lampiran 7**). Masyarakat di Kelurahan Kenjeran memiliki keterbatasan dalam pemenuhan hak dasar. Hal tersebut berdampak pada kemiskinan serta ketidakmampuan ekonomi. Tuntutan pemenuhan kebutuhan dasar bertambah mahal dan sulit. Demikian pula terbatasnya jumlah lapangan kerja yang dialami masyarakat Kelurahan Kenjeran. Terbatasnya lapangan kerja dapat memicu tindakan kriminalitas akibat kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Maka diperlukan produktivitas masyarakat yang didukung sumber daya alam dan sumber daya manusia serta jaminan kesehatan dan pendidikan. Penanggulangan lebih diarahkan pemenuhan hak dasar yang ditujukan kepada rumah tangga miskin bukan perseorangan.

E. Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Surabaya

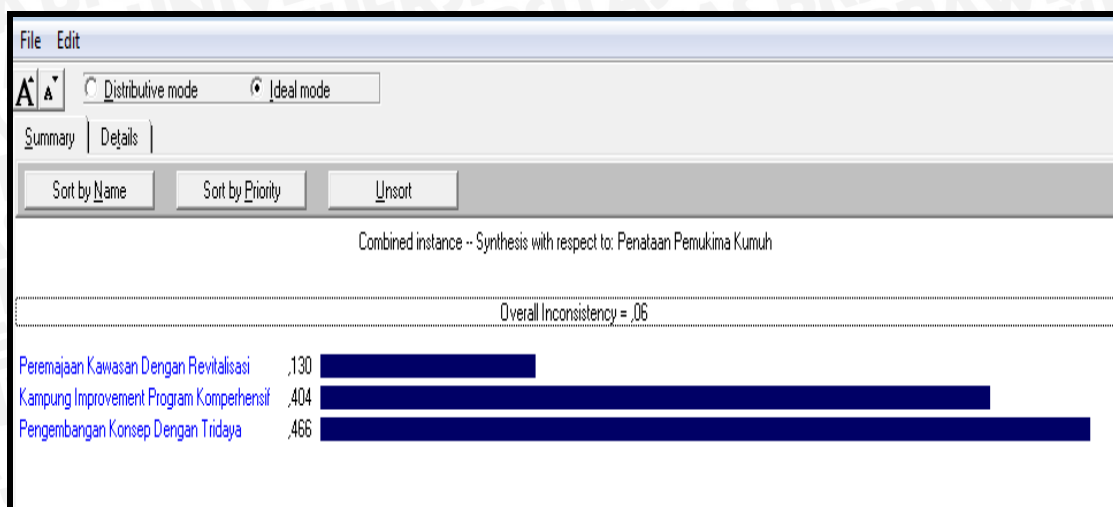
Parameter utama yang menjadi prioritas menurut BAPPEKO adalah komitmen pemerintah setempat, pendidikan, dan kesehatan sebesar 23,6%, nilai ketidakkonsistennya 1% (**Lampiran 7**). Berdasarkan BAPPEKO, pendidikan, kesehatan, dan komitmen pemerintah berpengaruh penting dalam program Tridaya. Dalam mewujudkan komitmennya, pemerintah mengalami kendala dalam penyelenggaraan kebijakan sosial dan lingkungan permukiman. Kendala tersebut karena belum ada penyusunan pedoman mengenai strategi penyelenggaraan permukiman melalui pemerintah pusat dan daerah. Maka perlu mempertimbangkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk pengoptimalan biaya pembangunan infrastruktur permukiman. Dalam tahap pembangunan kualitas permukiman masyarakat Kelurahan Kenjeran kurang mampu berpartisipasi secara optimal karena keterbatasan ekonomi dan pendidikan. Masyarakat masih memiliki keterbatasan dalam hal pendidikan yang dibuktikan dari kondisi wilayah studi dimana sebanyak 285 masyarakat tidak menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun. Hal tersebut menunjukkan perlunya kegiatan pelatihan supaya masyarakat dapat berkelanjutan meningkatkan

kualitas rumah huniannya. Upaya-upaya kesehatan belum berhasil di Kelurahan Kenjeran diantaranya perbaikan sanitasi pada rumah warga terutama yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Maka dari itu perlu penyuluhan kepada masyarakat tentang pola hidup sehat, pemberdayaan generasi muda di Kelurahan Kenjeran, pengembangan media sadar hidup sehat.

F. Gabungan lima responden AHP

Parameter yang menjadi prioritas berdasarkan gabungan lima responden adalah komitmen pemerintah setempat sebesar 19,2%, nilai ketidakkonsistennya 1%.**(Lampiran 7)**. Komitmen pemerintah setempat merupakan prioritas yang utama. Maka dari itu diperlukan kerjasama lintas sektor dan bidang antar pemerintah pusat dan daerah. Misalnya dengan penguatan kapasitas untuk mengedepankan peran pemerintah daerah dalam mendukung kemandirian masyarakat. Sebagai wujud komitmen pemerintah, diperlukan peningkatan kemitraan antara pemerintah dengan swasta serta peran aktif masyarakat dalam peningkatan kinerja tersebut. Wujud komitmen pemerintah dapat dilakukan dengan permukiman terpadu yang berpihak kepada masyarakat. Posisi masyarakat Kelurahan Kenjeran sebagai target kelompok sumber aspirasi dan pelaku pembangunan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan kondisi perekonomian dan pendidikan. Hal ini terkait pula dengan kondisi eksisting di masyarakat Kelurahan Kenjeran. Upaya penanggulangan kemiskinan serta perbaikan lingkungan di Kelurahan Kenjeran banyak diberikan melalui program yang digulirkan pemerintah. Namun, tidak mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan masyarakat. Dari serangkaian strategi tersebut diperlukan keberlanjutan komitmen pemerintah untuk menunjang pemberdayaan dalam memfasilitasi kebutuhan masyarakat sebagai penerima program.

4.8.4 Tingkat prioritas program penataan permukiman kumuh berdasarkan lima ahli.



Gambar 4.16 Tingkat prioritas program berdasarkan lima responden AHP

Gambar 4.16 menunjukkan program utama yang menjadi prioritas adalah pengembangan masyarakat dengan Konsep Tridaya yaitu 46,6 %. Pengembangan masyarakat dengan konsep Tridaya merupakan prioritas dalam upaya penataan permukiman kumuh di Kelurahan Kenjeran, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Kelemahan yang terjadi sampai saat ini adalah terkikisnya kesadaran masyarakat Kelurahan Kenjeran dalam upaya perbaikan lingkungan. Warga di Kelurahan Kenjeran, sebagian besar menggantungkan bantuan dari pemerintah kota dalam upaya perbaikan lingkungan. Kelembagaan BKM Kelurahan Kenjeran paling potensial dibandingkan kelembagaan lain. Pada BKM terdapat Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang mengelola dana bergulir untuk masyarakat miskin dan mendukung kemandirian KSM dalam mengembangkan kapasitas sosial ekonomi masyarakat. Secara khusus hal tersebut merupakan bagian dari implementasi pengembangan kelembagaan berbasis masyarakat. Penguatan kelembagaan masyarakat melalui wadah BKM merupakan proses pembelajaran penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh melalui pembelajaran konsep Tridaya.
- Sasaran utama program Tridaya adalah kelompok rumah tangga miskin (berpendapatan rendah) bukan individu warga miskin, khususnya masyarakat miskin yang sudah ditetapkan bersama dalam daftar masyarakat miskin. Dengan tujuan utama tersebut, diharapkan dapat mendorong pemerintah kota

supaya tanggap terhadap kebutuhan masyarakat miskin melalui penguatan kemitraan dengan masyarakat. Diharapkan dapat terwujud pelayanan kepada masyarakat miskin dalam hal akses pelayanan dasar, jaminan sosial, dan prasarana lingkungan permukiman. Hal tersebut sesuai dengan kondisi tingkat kemiskinan di Kelurahan Kenjeran merupakan kategori kumuh sedang, kumuh berat, dan sangat kumuh (28% KK termasuk kategori pra sejahtera dan sejahtera 1).

- c. Dalam program Tridaya, pemerintah tidak mengadakan proyek dalam upaya perbaikan permukiman secara langsung. Pemerintah memberi bantuan teknis dan memfasilitasi masyarakat untuk membuat program sendiri melalui kelompok masyarakat. Lebih tepatnya masyarakat sebagai peran utama daripada sebagai penonton. Diharapkan masyarakat dapat menyadari bahwa membangun permukiman bukan menunggu bantuan pemerintah, tetapi berupaya untuk menciptakan partisipasi didalamnya.
- d. Terdapat kegiatan sosial untuk penanggulangan bencana dalam Konsep Tridaya. Kegiatan penanggulangan bencana berbasis komunitas melibatkan peran aktif masyarakat dalam menangani dan memantau resiko bencana. Hal tersebut berkaitan dengan bencana alam yang melanda Kelurahan Kenjeran yaitu banjir, puting beliung, pasang surut air laut dan abrasi yang berdampak terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
- e. Dalam pelaksanaan program KIP-K, diperlukan peran aktif lembaga yayasan kampung dan koperasi serba usaha untuk kegiatan ekonomi (pemberian pinjaman bergulir). Operasionalisasi yayasan kampung dan koperasi serba usaha di Kelurahan Kenjeran tidak berkembang, karena pada awal program berjalan, lebih banyak terlibat dalam hal pembangunan fisik lingkungan. Sewaktu program berakhir, dana telah terserap, kegiatan yayasan kampung dan koperasi serba usaha juga berakhir.
- f. Dalam pelaksanaan program revitalisasi, tidak mempertimbangkan aspek pendidikan dan kesehatan. Pada kondisi eksisting, sebanyak $\pm 50\%$ masyarakat Kelurahan Kenjeran mendapatkan pelayanan kesehatan di bawah standar karena keterbatasan tenaga petugas kesehatan memberikan pelayanan. Di sisi lain pembiayaan untuk kesehatan serta kesadaran masyarakat berperilaku sehat masih minim. Kondisi kesehatan masyarakat Kelurahan Kenjeran bermasalah karena kesakitan malaria, diare, demam berdarah dan ISPA

termasuk kategori kumuh ringan pada salah satu RW nya. Berdasarkan aspek pendidikan, 285 masyarakat tidak tamat sekolah dasar. Salah satu penyebabnya adalah faktor internal keluarga yaitu orang tua tidak memberikan kesempatan untuk bersekolah. Masyarakat beranggapan bahwa pendidikan yang ditempuh tidak menjamin peningkatan taraf hidup keluarga, hanya mengeluarkan pendapatan sia-sia karena pendapatan mereka jauh di bawah upah minimum kota.

4.9 Program Penataan Permukiman berdasarkan Kebijakan Kota Surabaya dan Identifikasi Tingkat Kekumuhan

Program yang menjadi prioritas penataan permukiman kumuh Kelurahan Kenjeran adalah pendekatan masyarakat dengan Konsep Tridaya (**Gambar 4.35**). Tingkat prioritas langkah-langkah program Tridaya berdasarkan pendapat para ahli yaitu:

1. Komitmen pemerintah setempat
2. Kesehatan
3. Pendidikan
4. Pemenuhan hak dasar dan partisipasi masyarakat
5. Penanggulangan bencana
6. Pengembangan kapasitas
7. Sarana prasarana
8. Pinjaman bergulir
9. Kelembagaan KSM

Sembilan langkah Tridaya tersebut digabungkan dengan hasil analisis tingkat kekumuhan untuk menentukan program penataan permukiman kumuh di Kelurahan Kenjeran. Indikator tingkat kekumuhan yang digunakan untuk program penataan permukiman terdapat pada **Tabel 4.31**

Tabel 4.31 Indikator Tingkat Kekumuhan yang digunakan untuk Program Penataan

Indikator	Wilayah				Kondisi kekumuhan
	RW 1	RW 2	RW 3	RW 4	
Legalitas tanah	✓	✓	✓		Kumuh sedang dan kumuh berat.
Status penguasaan bangunan			✓		Kumuh ringan
Intensitas kebakaran	✓		✓	✓	Kumuh ringan
Intensitas banjir	✓	✓	✓	✓	Kumuh sedang
Intensitas abrasi	✓	✓	✓		Kumuh ringan
Intensitas puting beliung	✓	✓			Kumuh ringan
Intensitas pasang surut air laut.	✓	✓			Kumuh ringan
Bangunan rumah tidak sehat dan nyaman.	✓	✓	✓	✓	Kumuh ringan dan kumuh berat
Sanitasi lingkungan	✓	✓	✓	✓	Kumuh ringan dan kumuh sedang
Persampahan	✓	✓			Sangat kumuh
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	✓	✓	✓	✓	Sangat kumuh
Drainase	✓	✓	✓	✓	Kumuh ringan, kumuh sedang, dan sangat kumuh.
Status gizi balita	✓	✓	✓	✓	Kumuh ringan dan tidak kumuh
Angka kesakitan malaria	✓	✓	✓	✓	Kumuh ringan dan tidak kumuh
Angka kesakitan diare	✓	✓	✓	✓	Tidak kumuh
Angka kesakitan ISPA	✓	✓	✓	✓	Kumuh ringan dan tidak kumuh
Angka kesakitan demam Berdarah	✓	✓	✓	✓	Kumuh ringan dan tidak kumuh
Tingkat kemiskinan	✓	✓	✓	✓	Kumuh sedang, kumuh berat, dan sangat kumuh
Tingkat pendapatan	✓	✓	✓	✓	Sangat kumuh
Tingkat pendidikan	✓	✓	✓	✓	Kumuh ringan dan kumuh berat

Tabel 4.32 Program Penataan Permukiman berdasarkan Tingkat Kekumuhan dan Tridaya

Prioritas pelaksanaan Tridaya	Kelurahan Kenjeran
1. Komitmen pemerintah Setempat	• Mengkoordinasikan pengendalian dan penanggulangan bencana. Diperlukan peningkatan pengendalian penanggulangan bencana mulai tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi dalam pelaksanaan penanggulangan pelaksanaan penanggulangan dampak bencana. • Mengkoordinasikan keberlanjutan kegiatan dalam mendukung kegiatan penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh yang berbasis kawasan. Program perbaikan lingkungan permukiman dilaksanakan secara berkesinambungan mulai pembentukan dan pendampingan kelompok swadaya masyarakat serta pemandirian kelompok swadaya masyarakat. • Peningkatan aspek kemandirian kelembagaan masyarakat Kelurahan Kenjeran karena belum adanya pembinaan dalam berorganisasi secara optimal. Dilakukan perbaikan kelembagaan secara terintegrasi mulai penyempurnaan penerapan manajemen kinerja, struktur organisasi dan peningkatan kualitas SDM. • Pemerintah berkomitmen dengan memberikan jaminan kesamaan hak bagi setiap individu dalam pengambilan keputusan. Berkaitan dengan partisipasi, perlu tuntutan pemerintah untuk meningkatkan fungsi kontrol terhadap manajemen pemerintah. • Peningkatan kapasitas aparat pemerintah setempat dalam pelayanan dan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> untuk penanganan kemiskinan di Kelurahan Kenjeran. • Dalam mewujudkan komitmen pemerintah setempat, upaya penataan permukiman kumuh di Kelurahan Kenjeran diperlukan mekanisme untuk pengawasan yaitu: a. Melaksanakan kampanye/ sosialisasi tentang transparansi dan akuntabilitas mengenai kebijakan penataan permukiman kumuh. b. Menyusun pedoman pelibatan masyarakat dalam mengatasi permukiman kumuh. Pedoman tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan penataan permukiman kumuh, pengendalian permukiman kumuh, dan sebagai hubungan dari pedoman yang ada. Dalam proses penyusunan perlu melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, kelompok masyarakat serta instansi pemerintah tingkat pusat dan daerah.

Prioritas pelaksanaan Tridaya	Program	RW 1	RW 2	RW 3	RW 4
2. Kesehatan	• Revitalisasi posyandu yaitu dengan mengembalikan fungsi posyandu serta meningkatkan kembali partisipasi masyarakat.	✓			
	• Peningkatan deteksi dini gizi buruk balita di posyandu melalui Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (SKD-KLB)	✓			
	• Pendampingan kader posyandu untuk mendukung fungsi posyandu yang dikelola masyarakat.	✓	✓	✓	✓
	• Pembasmian serangga secara berkala dengan <i>fogging</i> , membersihkan genangan air di setiap rumah.	✓	✓	✓	✓
	• Pembagian kelambu berinsektisida secara massal kepada masyarakat melalui puskesmas.			✓	
	• Program/kegiatan penyediaan air minum, pengelolaan dan pembuangan limbah cair, gas dan padat.	✓	✓	✓	✓
	• Puskesmas Kelurahan Kenjeran menghimbau warga untuk meningkatkan kebersihan lingkungan karena minimnya kondisi persampahan di lingkungan mengakibatkan diare	✓	✓	✓	✓
	• Promosi kesehatan tentang pemberantasan sarang nyamuk dan pemilihan warga masyarakat sebagai juru pemantau jentik nyamuk				✓
	• Petugas kesehatan mensosialisasikan gejala penyakit demam berdarah, serta mengimbau warga segera melaporkan jika mengetahui penularan penyakit tersebut.	✓	✓	✓	✓
	• Melakukan penyaringan asap dari limbah industri perikanan sebelum asap dibuang ke udara dengan cara memasang bahan penyerap polutan.	✓	✓		
	• Penyuluhan pada masyarakat untuk perbaikan kondisi rumah. Hal yang perlu diperhatikan adalah memperhatikan aspek kesehatan dan aspek kenyamanan penghuni. Upaya yang dilakukan dengan cara memberikan penghawaan dan pencahayaan yang baik.	✓	✓	✓	✓
3. Pendidikan	• Pelayanan pendidikan dasar melalui tunjangan siswa, orang tua asuh, serta Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi penduduk miskin.			✓	✓
	• Program Bantuan Siswa Miskin (BSM). BSM memberikan peluang bagi siswa miskin untuk memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak.	✓	✓		
4. 1 Pemenuhan hak dasar	• Memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat untuk optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan kesempatan kerja penduduk miskin.		✓		
	• Memperluas akses masyarakat miskin terhadap lapangan kerja di sektor formal dan memberikan perlindungan sosial.	✓	✓	✓	✓
	• Mengadakan program peningkatan dan sertifikasi sumber daya manusia.		✓	✓	✓
	• Pemerintah memberikan Dana program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kenyamanan rumah	✓	✓	✓	

	Program	RW 1	RW 2	RW 3	RW 4
	Rehabilitasi rumah secara bergotong royong. Bantuan anggaran sebaiknya diterima langsung oleh kelompok masyarakat bertujuan untuk meminimalisasi penyalahgunaan bantuan pihak lain				✓
	Pemberian tunjangan perumahan. Ditentukan berdasarkan presentase pendapatan yang dimiliki tanpa memperhitungkan keseluruhan biaya untuk sebuah rumah.			✓	
4.2 Partisipasi masyarakat.	Pemberdayaan dari pihak Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Kenjeran ditekankan pada peningkatan aktif partisipasi masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.	✓	✓	✓	✓
	Pola pembangunan yang dianut oleh pemerintah <i>bottom up planning</i>, yaitu perencanaan pembangunan yang dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kenjeran sampai dengan provinsi di provinsi, bahkan sampai pada level pemerintahan pusat.	✓	✓	✓	✓
5. Penanggulangan Bencana	Penyuluhan untuk membangun kesadaran masyarakat dalam menyediakan sarana prasarana yang murah dan efektif untuk penanganan kebakaran cepat secara swadaya. Selain itu penyuluhan mengenai pemasangan kompor gas yang tepat dan aman pada setiap RW.	✓		✓	✓
	Penghijauan hutan mangrove di sekitar pantai, sehingga pemerintah setempat tidak perlu membangun pemecah gelombang dengan dana yang besar.	✓	✓	✓	
	Penanggulangan banjir yang dilakukan secara bertahap dari pencegahan banjir, penanganan banjir dan pemulihan secara berkesinambungan dan menyeluruh. Kegiatan fisik dilakukan dengan pembangunan pengendali banjir. Kegiatan non fisik dengan pengelolaan tata guna lahan sampai sistem peringatan dini banjir.	✓	✓	✓	✓
	Sosialisasi rencana pengelolaan kawasan sempadan pantai kepada seluruh masyarakat yang bermukim di sekitar pantai dan kepada seluruh stakeholders terkait.	✓	✓	✓	
	Menerapkan standar-standar rancangan dan peraturan teknis yang memadai, khususnya standar bangunan infrastruktur yang tahan bencana, melatih masyarakat melalui program latihan kebencanaan.	✓	✓	✓	✓
6. Pengembangan kapasitas	Memberdayakan lembaga nelayan untuk mandiri dan profesional dalam membuka akses pemasaran baik pemasaran lokal maupun regional.	✓	✓		
	Peningkatan kapasitas melalui bentuk pendidikan dan pelatihan (sosialisasi dan pendampingan) di setiap pertemuan kelompok tukang bangunan. (Pendidikan dan pelatihan dengan manajemen organisasi)			✓	✓
7. Sarana prasarana	Manajemen persampahan berbasis pada masyarakat, dimulai dari pengelolaan sampah tingkat rumah tangga	✓	✓		
	Perlu melakukan penanaman pohon di pekarangan rumah dan sekolah. Keberadaan pohon/tanaman merupakan langkah penyediaan ruang terbuka hijau privat.	✓	✓		✓

	Program	RW 1	RW 2	RW 3	RW 4
	Kerja bakti untuk perbaikan ruang terbuka yang tidak terawat secara swadaya. Serta menghimbau kepada masyarakat yang memiliki hewan ternak untuk memberikan tempat khusus bagi ternak dan tidak merusak lahan terbuka hijau.			✓	
	Pendekatan <i>Community Led Total Sanitation</i> (CLTS). Terdapat kegiatan <i>Participatory Rural Appraisal</i> (PRA) pada CLTS.		✓		
	Pengadaan klinik sanitasi untuk pengendalian penyakit dengan bimbingan, penyuluhan, dan bantuan teknis petugas puskesmas.	✓		✓	✓
	Mengelola limpasan dengan cara mengembangkan fasilitas untuk menahan air hujan, menyimpan air hujan maupun pembuatan fasilitas resapan.	✓	✓	✓	✓
	Pelumpuran: pembersihan saluran drainase dari endapan atau sampah dengan dialiri air. Hal tersebut bertujuan untuk mengantisipasi luapan genangan air di jalan.			✓	
8. Pinjaman bergulir	Peningkatan sosialisasi program dana bergulir, tujuannya supaya masyarakat dan pengelola program dapat memahami program dana bergulir.	✓	✓	✓	✓
	Pengumpulan sumber daya baik dari pihak individu atau lembaga di tingkat kelurahan yang memiliki kemampuan serta kepedulian terhadap pengembangan keuangan mikro serta pinjaman bergulir.	✓	✓	✓	✓
9. Kelembagaan KSM	Peningkatan fungsi Lembaga Pemerintahan Kelurahan, kelembagaan sosial masyarakat di Kelurahan Kenjeran dan sumber daya masyarakat melalui pelatihan pendampingan baik lembaga formal maupun non formal.	✓	✓	✓	✓
	Memberikan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat. Dilakukan dengan pengorganisasian masyarakat, menempatkan masyarakat di Kelurahan Kenjeran sebagai pelakunya. Masyarakat perlu diberi pendampingan mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan sampai pemeliharaan dan pelestarian.	✓	✓	✓	✓